

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang mengamanatkan agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan hak kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SK Negeri dan Swasta.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni merepresentasikan dimensi partisipasi pendidikan pada tingkat SD/MI sampai SMA/MA. Selama periode 2015 hingga 2018, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/MA 11,01 poin dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 6,29 poin.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Banten Tahun 2015 – 2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2015	2016	2017	2018
SD/MI	107,7	108,23	107,44	103,92
SMP/MTs	98,86	99,4	99,54	97,61
SMA/MA	73,22	76,82	83,01	84,23

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.33
Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Banten Agustus 2018

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan yang Ditamatkan		
		< SD	SD/Sederajat	SLTP
1	Kab. Pandeglang	4.541	9.48	10.56
2	Kab. Lebak	3.665	9.609	15.61
3	Kab. Tangerang	5.073	24.005	32.627
4	Kab. Serang	2.563	11.727	20.658
5	Kota Tangerang	674	11.064	12.583
6	Kota Cilegon	1.728	3.333	1.663
7	Kota Serang	1.749	7.112	4.577
8	Kota Tangerang Selatan	497	1.109	3.007
	Provinsi Banten	20.49	77.438	101.285

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan yang Ditamatkan		
		SLTA	D3	Jumlah
1	Kab. Pandeglang	16.622	2.306	43.509
2	Kab. Lebak	16.939	900	46.723
3	Kab. Tangerang	92.883	9.909	164.497
4	Kab. Serang	47.896	1.319	84.163
5	Kota Tangerang	40.554	12.827	77.702
6	Kota Cilegon	10.928	887	18.539
7	Kota Serang	9.342	1.677	24.457
8	Kota Tangerang	27.164	5.365	37.142
	Provinsi Banten	262.328	35.190	496.732

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Murni Provinsi Banten Tahun 2015 – 2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2015	2016	2017	2018
SD/MI	95,7	95,4	94,58	92,76
SMP/MTs	80,14	75,12	75,3	73,27
SMA/MA	55,73	57,34	60,05	62,02

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 67 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2017 tidak bersekolah lagi.

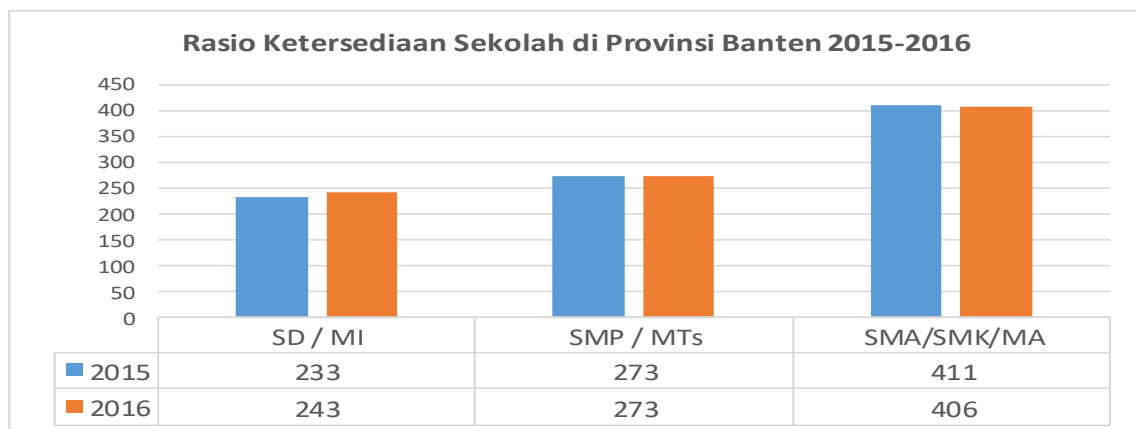
Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah	Lagi/Tidak Sekolah
Laki - Laki / Male			
7-12	0,77	99,23	0,00
13-15	0,20	95,95	3,85
16-18	0,83	68,39	30,78
19-24	0,19	20,38	79,43
7-24	0,50	67,91	31,59
Perempuan/ Female			
7-12	0,42	99,38	0,19
13-15	0,34	95,39	4,27
16-18	0,00	67,07	32,93
19-24	0,08	22,31	77,61
7-24	0,23	68,27	31,50
Laki - Laki - Perempuan			
7-12	0,60	99,31	0,10
13-15	0,27	95,67	4,06
16-18	0,44	67,77	31,79
19-24	0,14	21,33	78,53
7-24	0,37	68,09	31,55

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Pada kelompok umur 7-12 dan 13-15, angka partisipasi sekolah sudah relatif tinggi, yaitu 99,31 dan 95,67. Namun demikian, APS kelompok usia 16 - 18 tahun masih rendah. Dengan nilai APS yang sebesar 67,77 persen, menunjukkan bahwa masih terdapat sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2017 tidak bersekolah lagi

Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. Adapun untuk gedung sekolah SD/MI, peningkatannya masih sedikit di bawah pertambahan penduduk usia sekolahnya.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.21
Rasio Ketersediaan Sekolah di Provinsi Banten 2015-2016

Tabel 2.36
Jumlah murid SLTA (SMA+SMK) di Provinsi Banten
Tahun 2015-2018

KABUPATEN/ KOTA	2015	2016	2017	2018
Kab. Tangerang	102.729	110.884	115.538	113.540
Kota Tangerang	74.983	77.117	77.685	73.557
Kab. Serang	42.247	46.523	48.445	46.560
Kota Tangerang Selatan	53.881	57.492	60.935	58.242
Kab. Lebak	34.538	36.790	37.555	38.039
Kab. Pandeglang	33.591	37.579	39.240	38.697
Kota Serang	30.546	31.709	32.907	30.594
Kota Cilegon	17.589	18.410	18.967	18.270
PROVINSI BANTEN	390.104	416.504	431.272	417.499

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Hal ini bukan berarti proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah berlangsung optimal karena penempatan tenaga pengajar belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan menentukan kualitas pendidikan, dimana salah satu indikatornya adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Banten, rasio murid-guru untuk tingkat SLTA rata-rata 18,32 sedangkan untuk MA rata-rata 16 seperti ditunjukkan pada table di bawah ini.

Tabel 2.37
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru SLTA
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	Kabupaten				
1	Pandeglang	36	15.056	829	18,16
2	Lebak	53	19.883	975	20,39
3	Tangerang	148	50.357	2.245	22,43
4	Serang	77	23.312	1.274	18,30
	Kota				
1	Tangerang	83	28.767	1.552	18,54
2	Cilegon	23	6.900	521	13,24
3	Serang	30	11.570	627	18,45
4	Tangerang Selatan	79	27.096	1.590	17,04
	Provinsi Banten	529	182.941	9.613	18,32

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.38
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru MA
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1	Kab.Pandeglang	84	13.168	887	15
2	Kab. Lebak	77	8.994	690	13
3	Kab. Tangerang	68	14.277	670	21
4	Kab. Serang	79	14.714	851	17
1	Kota Cilegon	24	4.112	254	16
2	Kota Tangerang	22	4.007	323	12
3	Kota Serang	24	4.226	275	15
4	Kota Tangerang Selatan	18	3.254	242	13
	Provinsi Banten	396	66.752	4.192	16

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.39
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru SMK
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1	Kab.Pandeglang	83	24.553	1.396	18
2	Kab. Lebak	51	17.678	897	20
3	Kab. Tangerang	177	65.628	2.278	29
4	Kab. Serang	84	25.637	1.187	22
1	Kota Cilegon	128	49.088	2.243	22
2	Kota Tangerang	22	12.125	588	21
3	Kota Serang	45	21.448	1.022	21
4	Kota Tangerang Selatan	78	34.204	1.289	27
	Provinsi Banten	668	250.361	10.900	23

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.40
Tingkat Pendidikan pengajar di SKH Banten
di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	Kab.Pandeglang	22	0	3	0	160	4	0	189
2	Kab. Lebak	4	4	1	0	89	6	0	104
3	Kab. Tangerang	16	2	4	0	137	2	0	161
4	Kab. Serang	13	0	0	0	30	0	0	43
5	Kota Cilegon	1	1	0	0	47	1	0	50
6	Kota Tangerang	20	2	4	1	151	3	0	181
7	Kota Serang	5	0	2	0	101	10	0	118
8	Kota Tangerang Selatan	32	2	10	0	129	11	0	184
	Provinsi Banten	113	11	24	1	844	37	0	1030

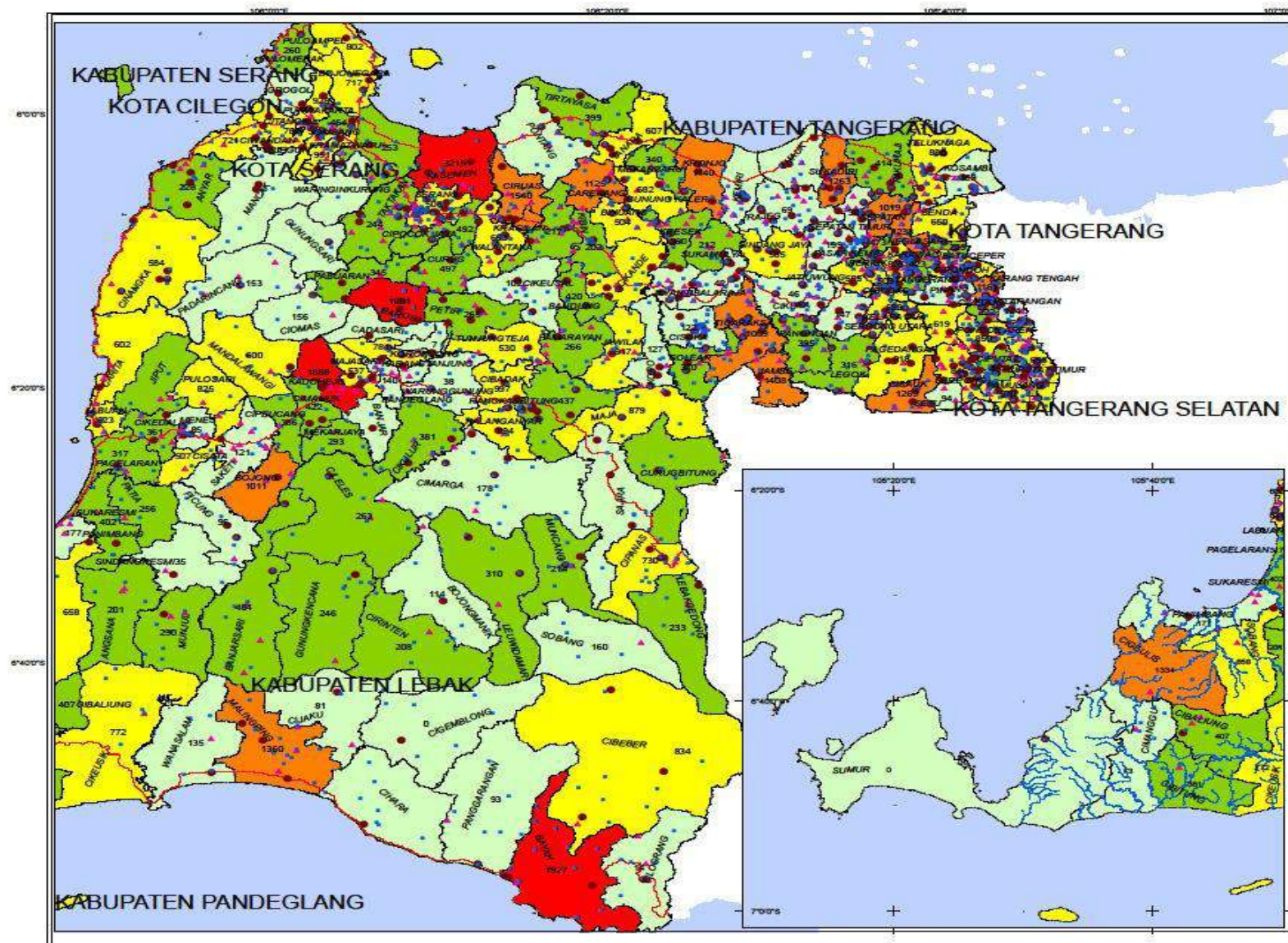
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Tabel 2.41
Data Ketunaan SKH Se-Banten di Provinsi Banten Tahun 2018

NO	KETUNAAN	SDLB							SMPLB				SMALB			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KETUNAAN	1	2	3	4	5	6	JLH	7	8	9	JLH	10	11	12	JLH
1	NETRA	12	16	13	8	2	7	58	15	9	8	32	6	5	12	23
2	RUNGU	107	99	116	85	73	95	575	89	102	70	261	72	62	60	194
3	GRAHITA RINGAN	153	141	128	134	107	149	812	167	118	126	411	106	78	53	237
4	GRAHITA SEDANG	83	158	117	104	110	134	706	140	132	130	402	104	67	52	223
5	DAKSA RINGAN	16	21	22	13	9	12	93	25	10	14	49	2	4	8	14
6	DAKSA SEDANG	20	12	15	4	5	4	60	10	2	6	18	4	2	2	8
7	LARAS	0	0	0	0	3	20	23	0	0	0	0	1	4	0	5
8	WICARA	1	2	8	5	2	3	21	1	0	1	2	0	0	0	0
9	HIPERAKTIF	11	16	20	13	10	6	76	7	2	5	14	1	0	0	1
10	CERDAS ISTIMEWA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	BAKAT ISTIMEWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KESULITAN BELAJAR	9	4	9	5	8	11	46	8	7	0	15	4	4	3	11
13	NARKOBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	INDIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DOWN SYNDROME	35	20	34	19	20	21	149	16	6	9	31	4	9	5	18
16	AUTIS	66	80	96	106	73	63	484	58	41	45	144	41	20	32	93
17	LAINNYA	23	10	4	8	7	6	58	5	4	1	10	2	0	0	2
18	JUMLAH	536	579	582	504	429	532	3162	541	434	415	1390	347	256	227	830
Jumlah Total																5382

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Pada tahun 2018 di Provinsi Banten terdapat 529 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9.613 guru dan 182.941 murid, 396 unit Madrasah Aliyah (MA) dengan 4.192 guru dan 66.752 murid, 668 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 10.900 guru dan 250.361 murid serta Jumlah guru SKH sebanyak 1.030 guru.



Gambar 2.21
Peta Sebaran Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017

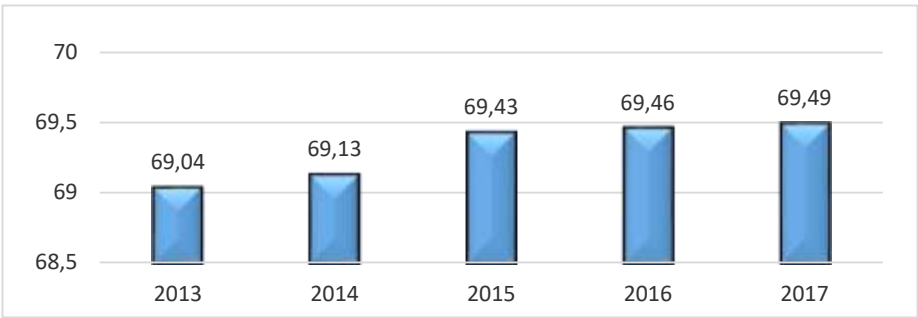


2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah, dalam upaya mencapai derajat kesehatan tersebut Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan upaya terobosan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

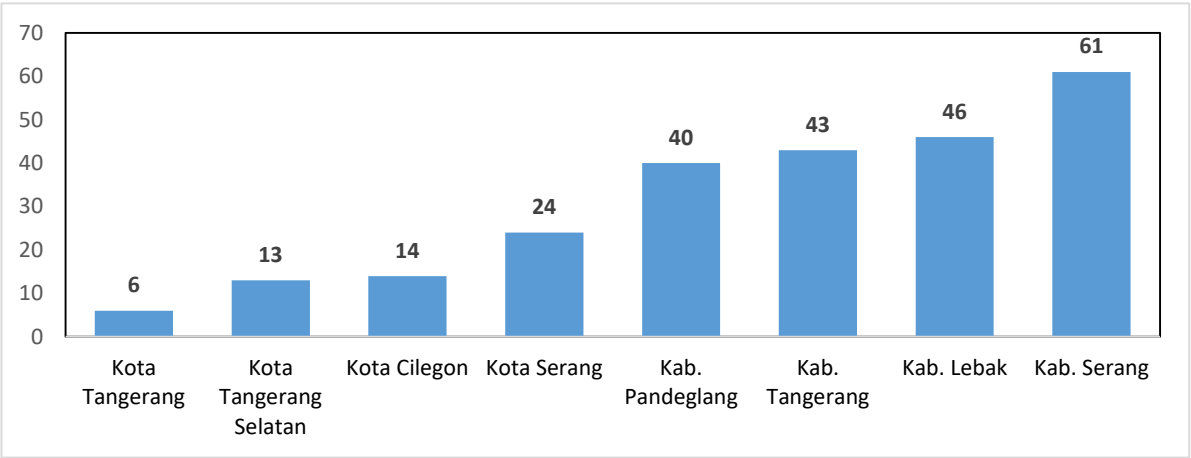
Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran.

Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2013 hingga 2017, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,96 tahun, yang setara dengan rata-rata pertumbuhan 0,19 persen per tahun. Bahkan, angka pertumbuhan tahun 2017 menjadi yang tertinggi selama periode tersebut. Angka Harapan Hidup Banten sendiri pada tahun 2017 ini mencapai 69,49 tahun atau sekitar 69 tahun 5 bulan.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.22
Angka harapan Hidup saat Lahir Provinsi Banten
Tahun 2010 – 2017

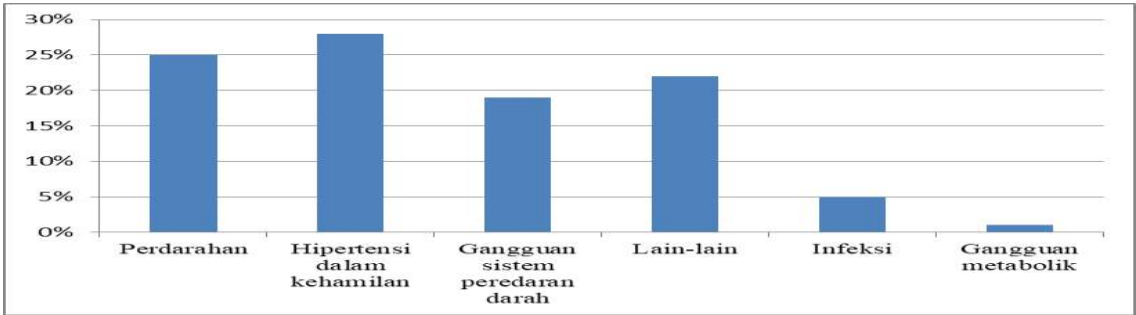


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.23
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan mencapai 227 kasus, dan angka kematian bayi yang dilahirkan mencapai 1.246 kasus. Berikut jumlah kematian ibu di Provinsi Banten pada tahun 2018.

Data berikut menggambarkan beberapa penyebab kematian ibu. Data didapatkan dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang disajikan dalam gambar berikut ini:

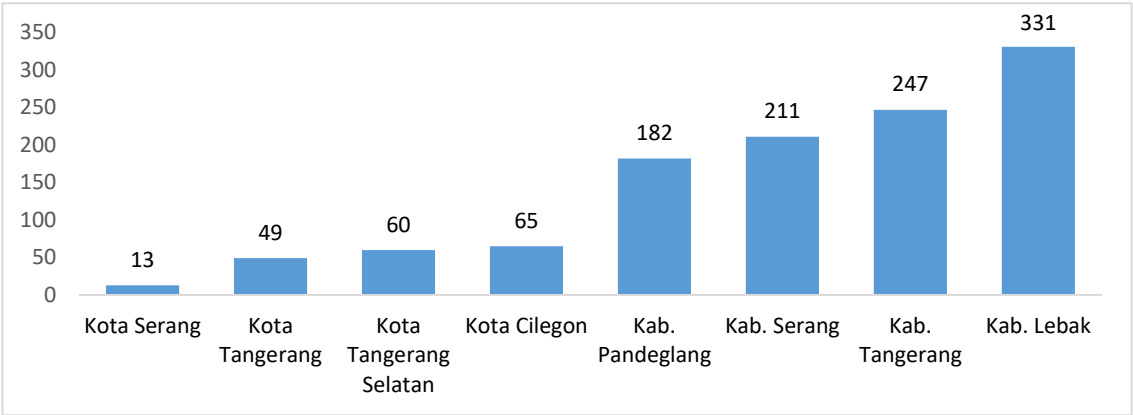


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.24
Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan Gambar diatas, menyebutkan bahwa penyebab utama kematian ibu 28% karena hipertensi dalam kehamilan, 25% karena perdarahan, 19% gangguan sistem peredaran darah, 5% karena infeksi, 1% karena gangguan metabolik dan lain-lain 22%. Sedangkan menurut hasil penelitian PUSKA FKMUI dengan USAID JHPIEGO tahun 2017 di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang Kota dan Kabupaten Serang, penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan, Preeklamsi dan eklampsi serta anemia pada kehamilan, dan komplikasi pada saat persalinan. Sekitar 15% dari kehamilan mengalami komplikasi, sisanya 85% normal.

Data selanjutnya adalah jumlah kematian bayi di Provinsi Banten. Sumber data angka tersebut didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 sebagai berikut:

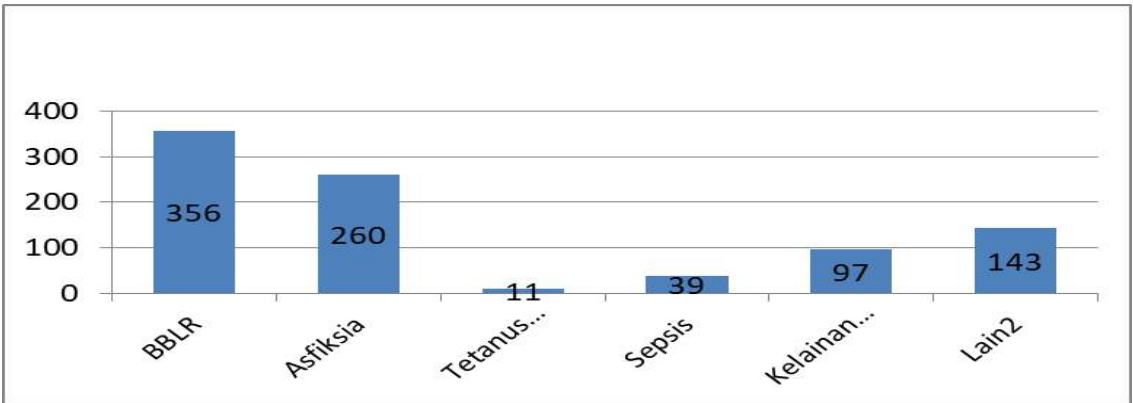


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.25
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas sebanyak 1.147 kasus. Angka kematian bayi pada tahun 2018 tertinggi berada di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 61 kasus, kemudian Kabupaten Lebak sebanyak 46 kasus dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 40 kasus. Sedangkan. Untuk kematian bayi tertinggi berda di wilayah Kabupaten Lebak sebanyak 326 kasus, Kabupaten Tangerang sebanyak 247 kasus dan Kabupaten serang sebanyak 205 kasus. Besaran angka ini menurut United States Agency for International Development (USAID) menjadikan Banten berkontribusi terbesar ke -4 untuk AKI, dan berkontribusi terbesar ke-5 untuk AKB di Indonesia.

Sedangkan penyebab terjadinya kematian pada bayi disebabkan berdasarkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut ini:



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.26
Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar tersebut penyebab kematian bayi di Provinsi Banten berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018 adalah karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital, sepsis, tetanus dan penyebab lain.

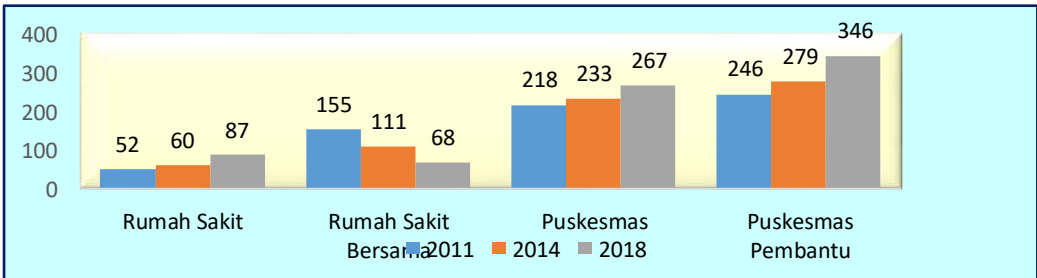
Tabel 2.42
Capaian Kinerja Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Provinsi Banten Tahun 2012-2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	85	81,2	77	80	90,2
2	Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	89	84	78,35	66	49
3	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	<1	0,001	<1
4	Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	74	61,3	56	60,2	63
5	Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	10	20	30	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

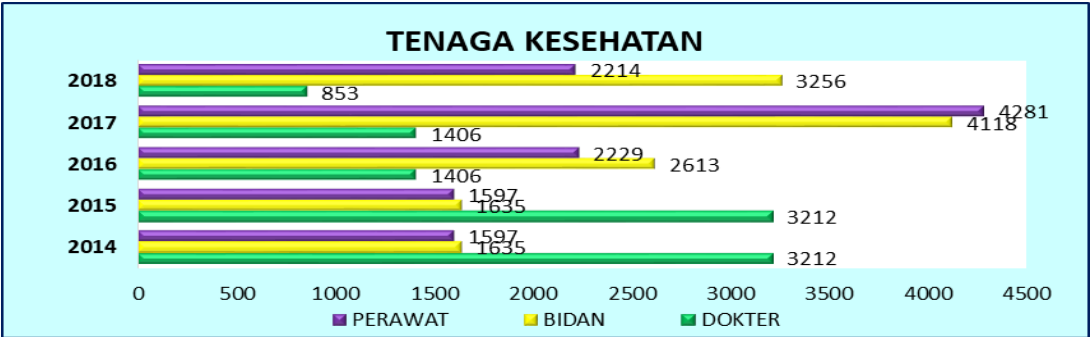
Capaian Program pencegahan dan pengendalian penyakit sudah cukup baik namun perlu penanganan dan kebijakan yang komprehensif agar lebih optimal.

Tingginya pemahaman penduduk Banten akan arti penting kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan petugas kesehatan dan difasilitasi oleh berbagai sarana kesehatan yang semakin bertambah banyak. Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2017 masing-masing sebanyak 106 unit rumah sakit dan 239 unit puskesmas. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 1.406 dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, serta 4.118 bidan dan 4.281 perawat.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.27
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2011-2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.28
Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2011–2018

Kasus HIV/AIDS menjadi permasalahan serius di Provinsi Banten dengan prevalensi HIV/AID mencapai <0,5 dengan fenomena gunung es dimana masih banyak yang belum terdeteksi. Selain itu penyakit menular yang butuh penanganan serius adalah penyakit diare yang mencapai 265.549 kasus.

Tabel 2.43
Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	HIV	AIDS	IMS	DBD	Diare	TB
Kab. Pandeglang	8	33	28	100	37.287	22
Kab. Lebak	28	14	120	15	39.627	4
Kab. Tangerang	178	30	1.366	69	68.796	5
Kab. Serang	88	27	910	344	28.533	2
Kota Tangerang	122	15	1.232	228	26.395	5
Kota Cilegon	33	26	538	230	11.767	2
Kota Serang	29	17	533	125	8.401	5
Kota Tangerang Selatan	148	35	204	249	2.338	8
Provinsi Banten	634	197	4.931	1.360	223.144	53

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.44
Prevalensi HIV (%) dari Total Populasi Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi HIV (%)	<0,5	<0,43	< 0,46	<0,48	<0,5

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

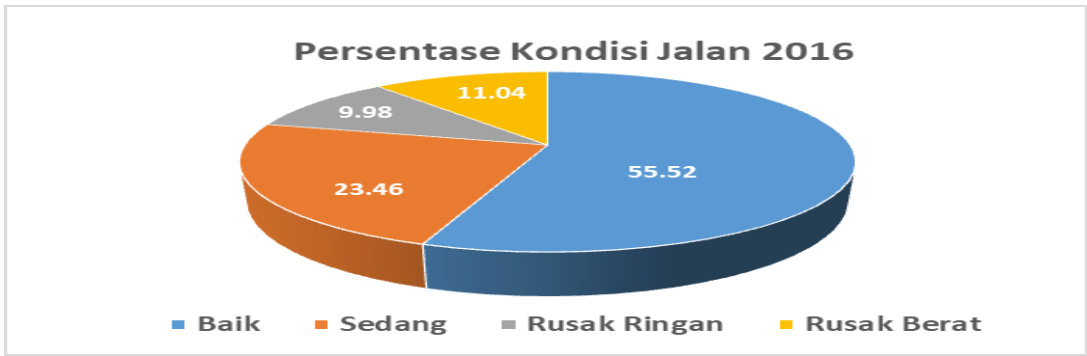
Capaian layanan urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang selama tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa jaringan jalan dan jembatan belum mantap, pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi, kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara serta Luas layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi teknis belum optimal.

Pada tahun 2016, dari 757,375 km Jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 420,48 km dalam kondisi baik (55,52%), kemudian 177,69 km dalam kondisi sedang (23,46), 75,58 km dalam kondisi rusak ringan (9,98%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (11,04%)

Tabel 2.45
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan Provinsi Banten
Tahun 2012-2016

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	429,42	229,65	384,79	384,79	420,48
Sedang	215,54	380,21	194,32	194,32	177,69
Rusak	128,55	174,39	60,31	60,31	75,58
Rusak Berat	79,38	68,64	213,47	213,47	
JUMLAH	852,89	852,89	852,89	852,89	757,375

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2017

Gambar 2.29
Persentase Kondisi Jalan Provinsi Banten

Tabel 2.46
Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan
Provinsi Banten Tahun 2010-2015

Jenis Permukaan	Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan (km)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Diaspal	758.91	666.22	660.72	736	504.91	-
Kerikil	-	-	1.50	-	-	-
Tanah	-	-	19.44	-	-	-
Beton	-	103.87	171.23	116.89	41.11	-
Tidak Dirinci	11.18	-	-	-	306.86	-
Jumlah	770.09	770.09	852.89	852.89	852.89	1329.38

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.47
Persentase Kondisi Jalan Menurut Wilayah Kerja Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016-2017

No	Wilayah/Nama Ruas jalan	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Kondisi (km) 2016				Panjang Tiap Kondisi (km) 2017			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WKP II										
	Sub Total	249,778	175,500	142,691	57,732	19,546	29,809	168,920	54,732	17,546	8,580
	Persentase %	32,98		33,94	32,49	25,86	35,65	35,01	31,13	28,55	22,86
	WKP I										
	Sub Total	188,454	244,000	124,888	50,954	7,790	4,822	127,738	52,104	7,682	0,930
	Persentase %	24,88		29,70	28,68	10,31	5,77	26,47	29,63	12,50	2,48
	WKP III										
	Sub Total	319,142	153,600	152,901	69,007	48,240	48,994	185,875	69,007	36,230	28,030
	Persentase %	42,14		36,36	38,83	63,83	58,59	38,52	39,24	58,95	74,67
	Total	757,375		420,48	177,69	75,58	83,62	482,53	175,84	61,46	37,54
	Persentase %	100,000		55,52	23,46	9,98	11,04	63,71	23,22	8,11	4,96

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.48
Capaian Infrastruktur Jembatan, Sumber Air dan Jaringan Irigasi Di Provinsi Banten Tahun 2013-2016

No	CAPAIAN	2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase jaringan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	87,78	75.79	87.83	74.34
2.	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi	6,11	3,10	0.00	6,30
3.	Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara	15,93	25,16	2,00	80,00
4.	Luas layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi teknis (Km)	3.706	2.525	5.190	3.911,98

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Pada urusan Penataan Ruang, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2020, penetapan Kawasan strategis di wilayah provinsi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: a. kepentingan pertahanan dan keamanan; b. pertumbuhan ekonomi; c. sosial dan budaya; d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRW meliputi: 1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang serta kawasan sport center yang diarahkan sesuai dengan potensinya sebagai Kawasan permukiman, perdagangan dan jasa; 2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah; 3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; 4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, dan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri; 5. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW adalah Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kawasan Situs Banten Lama yang meliputi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Sejalan dengan pengembangan kawasan strategis, untuk mendukung peningkatan prestasi olah raga di provinsi Banten perlu disediakan fasilitas olahraga (sport centre) yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Fasilitas tersebut memungkinkan Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

2.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI Nomor 4 Tahun 1992). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan 2001).

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2013-2015, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.

Rumah atau hunian tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dimiliki. Berdasarkan data yang ada, sekitar 82 persen rumah tangga di Banten pada tahun 2016 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Berarti, kepemilikan rumah oleh rumahtangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rumah yang baru, kebanyakan justru lebih luas dari rumah lama yang dulu mereka tempati. Kondisi yang demikian itu setidaknya tercermin dari turunnya persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal 7,2 meter persegi.

Kualitas rumah yang ditempati, baik dari bentuk fisik maupun fasilitas yang tersedia, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan status sosial penghuninya. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2016 sendiri terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan lantai terluas dari

marmer atau keramik dan berdinding terluas dari tembok. Hanya saja, persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan atap terluas dari beton atau genteng, justru menurun dari tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 2.49
Statistik Perumahan Banten (%) Tahun 2014-2016

URAIAN	2014	2015	2016
Rumahtangga menempati rumah milih sendiri	77,96	80,94	81,52
Rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai per kapita ≤7,2 M2	11,00	11,23	9,23
Rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai terluas marmer/kramik	NA	73,78	78,23
Rumahtangga menempati rumah dengan atap dari beton/genteng	83,26	79,16	79,14
Rumahtangga menempati rumah dengan dinding terluas dari tembok	84,86	84,88	87,47

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari- hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2016 ini masih ada sekitar tiga dari sepuluh rumahtangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.50
Jenis Air Bersih yang digunakan Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	PERSENTASE AIR BERSIH YANG DIGUNAKAN											
	Air kemasan		Ledeng		Pompa		Sumur		Lainnya		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kab Pandeglang	9,59	13,32	4,17	4,81	9,14	12,08	43,42	41,94	77,09	27,84	100	100
Kab Lebak	9,27	11,43	4,46	2,77	12,23	12,30	48,34	47,90	74,05	25,60	100	100
Kab Tangerang	58,65	60,48	3,09	6,77	28,26	26,24	9,87	6,51	9,99	0	100	100
Kab Serang	42,62	42,38	6,54	5,15	24,73	24,27	18,09	15	26,11	13,20	100	100
Kota Tangerang	68,25	73,92	8,67	5,17	22,24	20,38	0,30	0	0,85	0,53	100	100
Kota Cilegon	75,01	78,78	1,65	1,42	19,43	16,96	2,98	2,12	3,90	0,72	100	100
Kota Serang	47,01	53,51	1,21	3	38,07	30,40	10,82	10,43	13,71	2,67	100	100
Kota Tangerang Selatan	51,37	53,06	1,99	1,19	42,78	44,40	3,87	1,13	3,87	0,23	100	100
Provinsi Banten	46,89	49,82	4,52	4,54	24,95	24,18	15,97	13,91	23,63	7,55	100	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.51
Penggunaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2013-2014

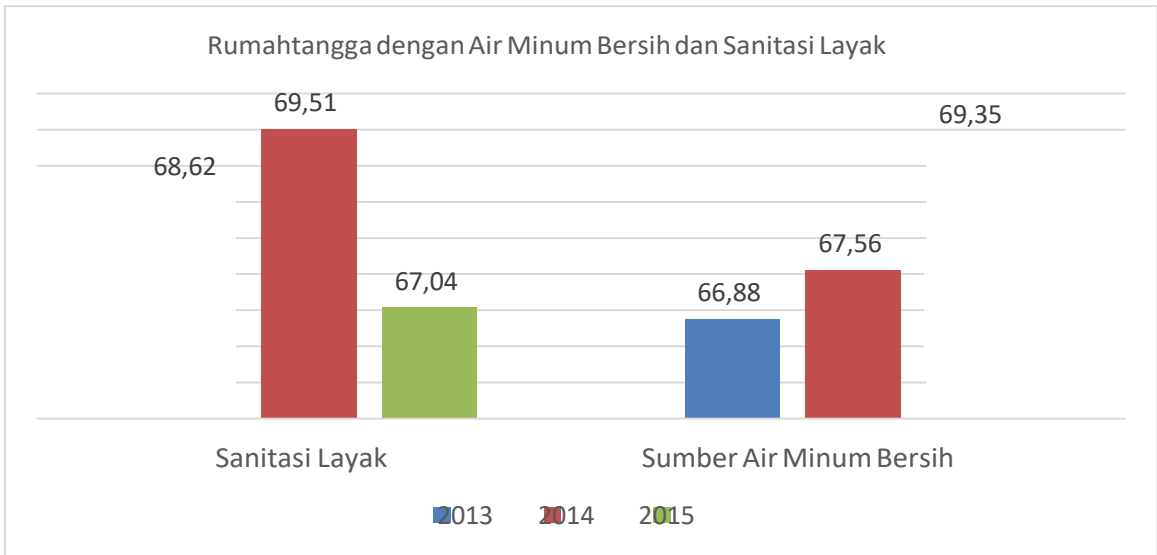
Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dalam Penggunaan Sanitasi									
	Sendiri		Bersama		Umum		Tidak Ada		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kab Pandeglang	46,92	51,60	4,94	4,51	4,24	2,47	43,90	41,43	100	100
Kab Lebak	50,38	52,92	4,35	6,74	2,06	1,56	43,21	38,79	100	100
Kab Tangerang	69,84	71,27	11,83	10,18	2,49	2,61	15,83	15,94	100	100
Kab Serang	48,56	56,38	6,64	7,44	3,06	0,74	41,74	35,43	100	100
Kota Tangerang	83,36	86,11	14,05	11,88	1,95	1,61	0,65	0,39	100	100
Kota Cilegon	87,87	90,04	6,87	3,76	0	0	5,26	6,19	100	100
Kota Serang	71,44	72,61	5,33	5,34	0,78	2,48	22,46	19,57	100	100
Kota Tangerang Selatan	94,29	96,77	4,71	2,92	0,50	0,31	0,50	0	100	100
Provinsi Banten	69,03	72,25	8,68	7,82	2,17	1,68	20,11	18,25	100	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.52
Luas lantai Bangunan Rumah Tangga Tahun 2013-2014

Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal											
	<20		20 â€“ 49		50 â€“ 99		100 â€“		150+		Jumlah	
	201	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	201	201	2014
Kab Pandeglang	2,18	1,83	33,97	33,38	51,35	51,22	9,11	9,34	3,39	4,23	100	100
Kab Lebak	2,27	2,70	51,93	46,09	39,52	44,21	5,08	5,64	1,21	1,36	100	100
Kab Tangerang	9,36	4,44	25,94	27,20	54,97	56,60	7,17	8,74	2,56	3,02	100	100
Kab Serang	5,07	5,44	31,18	26,36	52,96	55,46	8,03	9	2,76	3,74	100	100
Kota Tangerang	16,34	18,21	31,39	25,77	30,65	33,16	13,12	14,71	8,49	8,14	100	100
Kota Cilegon	4,07	2,34	19,34	16,12	44,17	45,32	22,69	20,15	9,74	16,0	100	100
Kota Serang	2,72	4,29	17,97	20,03	46,23	45,66	22,32	19,68	10,76	10,3	100	100
Kota Tangerang Selatan	2,45	1,82	26,10	22,22	41,08	50,31	16,89	16,42	13,49	9,22	100	100
Provinsi Banten	7,23	6,25	30,77	28,24	45,54	48,42	10,82	11,50	5,64	5,59	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.30
Rumahtangga dengan Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak 2013-2015

Tabel 2.53
Sumber Utama penerangan Rumah Tangga Tahun 2015

Kabupaten/kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kab Pandegalang	99,61	0,39	100
Kab Lebak	98,35	1,65	100
Kab Tangerang	99,94	0,06	100
Kab Serang	99,89	0,11	100
Kota Tangerang	100,00	0,00	100
Kota Cilegon	100,00	0,00	100
Kota Serang	100,00	0,00	1,00
Kota Tangerang Selatan	99,95	0,05	100
Provinsi Banten	99,74	0,26	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.54
Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Listrik	Gas/Elpiji	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak Memasak	Jumlah
Kabupaten							
Pandeglang	0,22	46,97	0,00	52,23	0,00	0,58	99,42
Lebak	0	41,83	0,00	58,07	0,10	0,00	100,00
Tangerang	0,63	91,89	0,81	5,15		1,28	98,72
Serang	0,36	77,72	0,30	20,32	0,23	0,92	99,08
Kota							
Tangerang	0,76	95,62	0,72	0,19	0,00	2,70	97,30
Cilegon	0,43	95,02	0,13	3,18	15,21	0,60	99,40
Serang	0,24	88,55	0,29	10,11	0,34	0,47	99,53
Tangerang selatan	0,89	97,90	0,66	0,30	0,00	0,25	99,75
Provinsi Banten	0,52	81,47	0,49	16,27	0,16	1,08	98,82

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umumn serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir.

Kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kondisi politik dan kondisi hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.55
Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten
Tahun 2012-2016

SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tindak Pidana	4.063	3.378	5.857	10.345	4.607	2.413
Penyelesaian Tindak Pidana	2.974	1.966	2.191	5.886	2.988	1.621
Persentase	26,80	41,80	62,59	43,10	35,14	

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masih cukup baik.

Tabel 2.56
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Wilayah Kepolisian Resort Provinsi Banten 2013–2016

Kepolisian Resort	2013	2014	2015	2016
Kepolisian Resort-Polda Banten				
Pandeglang	11,30	13,71	8,57	28,79
Lebak	11,79	15,09	13,75	44,73
Serang	27,57	75,87	63,00	83,21
Cilegon	20,49	18,63	19,85	213,29
Kepolisian Resort-Polda Metro Jaya				
Kota Tangerang	31,00	25,00	29,00	-
Kabupaten Tangerang	155,00	144,00	98,00	22,52
Kota Tangerang Selatan	.	.	.	

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2017

2.3.1.6 Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2012 hanya terdapat 22 jenis PMKS sehingga mengalami kenaikan pada tahun 2013 dimana pada tahun 2013 sudah menggunakan data 26 jenis PMKS. Pada tahun 2016 jumlah PMKS (26 PMKS) sebanyak 797.842 KK.

Tabel 2.57
Jumlah PMKS di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMKS (26 PMKS) (KK dan Jiwa)	742.517	825.914	806.189	799.510	797.842

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Jumlah TAGANA yang dilatih setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2012 s.d tahun 2016 sebanyak 1.402 Orang.

Tabel 2.58
Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih
di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih	1.286	1.286	1.286	1.286	1.402

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Selama 5 tahun (Tahun 2012 - 2016) mampu menangani 19.557 PMKS (Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan/ WKTK, Korban Penyalahgunaan Napza/ Eks Napza) dari total PMKS (Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan/ WKTK, Korban Penyalahgunaan Napza/ Eks Napza) sebanyak 137.212 Orang.

Tabel 2.59
Jumlah Penanganan PMKS di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Penanganan PMKS	3,636	3,799	3,910	4,028	4,184

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Korban bencana alam setiap tahun semakin menurun, dimana tahun 2012-2016 mampu menangani sebanyak 189.978 orang.

Tabel 2.60
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2012-2018

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Korban Bencana Alam (Orang)	18.714	100.486	51.355	8.252	7.900	82.262	5.484
Korban Bencana Sosial (Orang)	212	470	1,979	227	383	987	103
Jumlah	18.926	100.956	53.334	8.479	8.283	83.259	5.587

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.61
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut
Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2018

Kabupaten/ Kota	Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak dengan Kedisabil itas
Kab. Pandeglang	173	774	100	0	11	590
Kab. Lebak	116	763	7	34	72	1.126
Kab. Tangerang	11.218	65.050	1.158	95	150	422
Kab. Serang	3.447	11.834	63	7	200	712
Kota Tangerang	179	496	31	100	56	218
Kota Cilegon	0	3	1	1	50	108
Kota Serang	1389	5.102	17	0	141	234
Kota Tangerang Selatan	3	39	0	0	0	170
Banten	16.525	84.061	1.377	237	680	3.580

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Anak yang Menjadi KTK/Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan	Pengemis	Pemulung
Kab. Pandeglang	4	6.112	18	31	131
Kab. Lebak	0	13.925	14	34	112
Kab. Tangerang	41	17.433	166	270	2.784
Kab. Serang	11	3.314	102	157	1.660
Kota Tangerang	3	23.119	1	54	827
Kota Cilegon	21	1.371	38	47	209
Kota Serang	13	1.622	26	103	238
Kota Tangerang Selatan	0	19.211	0	1	340
Banten	93	86.107	365	697	6.301

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Bekas warga Binaan LP	korban penyalah gunaan NAPZA	Tuna Susila	Orang dengan HIV/AIDS(ODHA)
Kab. Pandeglang	88	42	1	7
Kab. Lebak	118	27	13	23
Kab. Tangerang	421	205	96	313
Kab. Serang	275	12	33	65
Kota Tangerang	239	191	15	4
Kota Cilegon	158	25	888	52
Kota Serang	48	22	58	15
Kota Tangerang Selatan	0	8	0	0
BANTEN	1.347	532	1.104	479

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.62
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Profesional	Pekerja Sosial Masyarakat	Karang Taruna	Dunia Usaha	WKSBM	Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan
Kab Pandeglang	0	1.619	339	3	22	35
Kab Lebak	0	1.725	345	30	43	28
Kab Tangerang	7	870	274	0	0	29
Kab Serang	5	319	326	2	2	29
Kota Tangerang	0	823	104	127	505	13
Kota Cilegon	2	215	51	20	43	8
Kota Serang	0	330	72	28	66	6
Kota Tangerang Selatan	107	220	57	2	0	7
Banten	121	6.121	1.568	212	681	155

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Taruna Siaga Bencana	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Pioner	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Penyuluh Sosial
Kab Pandeglang	210	1	1	117	99	0
Kab Lebak	214	191	2	0	11	4
Kab Tangerang	155	37	3	0	0	0
Kab Serang	189	85	3	0	0	0
Kota Tangerang	145	112	1	106	202	60
Kota Cilegon	200	11	1	7	43	0
Kota Serang	168	24	1	264	396	0
Kota Tangerang Selatan	121	13	1	6	50	1
Banten	1.402	474	9	500	801	65

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.63
Karakteristik Kerawanan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Komunitas Adat Terpencil	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial/Pengungsi
Kab Pandeglang	.	362	16
Kab Lebak	5.239	2.003	56
Kab Tangerang	.	2.999	98
Kab Serang	.	438	16
Kota Tangerang	.	634	12
Kota Cilegon	.	1.358	0
Kota Serang	.	106	0
Kota Tangerang Selatan	.	0	185
Provinsi Banten	5.239	7.900	383

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Tahun 2015 sebesar 317.201 orang (sisa tahun 2014 dan yang mendaftar tahun 2015). Dari seluruh pencari kerja yang terdaftar, 52.979 orang (16,70%) telah ditempatkan bekerja, sementara 80.376 orang (25,34%) dihapuskan dari daftar pencari kerja. Pada akhir tahun 2015, sisa pencari kerja di Provinsi Banten sebanyak 183.846 orang, dimana sebagian besar berpendidikan terakhir SMA yaitu 130.043 orang (70,73%), sementara yang paling sedikit berpendidikan terakhir Strata II/ Strata III sebanyak 378 orang (0,20%).

Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan jumlah pekerja terbanyak di tahun 2015 yaitu sebanyak 1.198.766 pekerja, diikuti dengan sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel dengan jumlah pekerja sebanyak 1.189.908 pekerja. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di provinsi Banten ;

Tabel 2.64
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja
Kab Pandeglang	831.548	62,81
Kab Lebak	898.868	67,56
Kab Tangerang	2.672.261	63,49
Kab Serang	1.055.834	62,42
Kota Tangerang	1.648.817	63,67
Kota Cilegon	312.796	63,56
Kota Serang	475.658	63,02
Kota Tangerang Selatan	1.284.952	61,92
Provinsi Banten	9.180.734	63,49

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.65
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Bekerja		Pengangguran	
	2017	2018	2017	2018
SD Ke Bawah	36,56	35,58	24,61	19,71
SMP	15,17	17,35	24,61	20,39
SMA	18,43	20,71	25,00	31,73
SMK	13,04	11,83	18,55	21,08
Diploma I/II/II	4,27	3,07	1,55	1,29
Universitas	12,54	11,45	5,68	5,80

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Sektor pertanian memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dari jumlah penduduk bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional, dan nasional. Cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

Tabel 2.66
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	232	2.075	2.307
Sekolah Dasar	532	860	1.392
Sekolah Menengah Pertama	4.755	8.430	13.185
Sekolah Mengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	42.755	35.006	77.761
Diploma I/II/III Akademi	1.578	3.023	4.601
Universitas	4.516	5.369	9.885
TOTAL	54.368	54.763	109.131

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.67
Informasi Pencari Kerja Dirinci Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016

No	Dinas Tenaga Kerja	Pencari Kerja				
		Sisa Tahun Lalu	Terdaftar Tahun Ini	Penempatan Tahun Ini	Dihapuskan Tahun Ini	Sisa Akhir Tahun Ini
1.	Kab. Pandeglang	25.938	9.040	2.775	16.377	15.826
2.	Kab. Lebak	14.150	8.075	729	6.950	14.546
3.	Kab. Tangerang	44.354	33.253	3.005	24.776	49.826
4.	Kab. Serang	18.035	27.251	3.936	25.900	15.450
5.	Kota Tangerang	15.388	17.627	9.839	5.537	17.639
6.	Kota Cilegon	12.654	4.727	1.661	836	14.884
7.	Kota Serang	20.101	1.253	101	-	21.253
8.	Kota Tangerang Selatan	12.250	7.905	3.385	-	16.770
Provinsi Banten		162.870	109.131	25.431	80.376	166.194

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten pada Tahun 2016 90,97 menjadi 91,14 pada Tahun 2017. Dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Banten pada Tahun 2016 69,14 menjadi 70,00 Tahun 2017. Dalam upaya pembangunan yang responsif gender dioptimalkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, ketersediaan data terpilah serta penyusunan anggaran rensposif gender kedalam Perencanaan

Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG), terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan mendorong terbentuknya kabupaten/kota layak anak, Provinsi Banten termasuk 4 (empat) daerah yang diberikan predikat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai provinsi pelopor layak anak.

Tabel 2.68
Capaian Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota	Tingkatan
Kab. Serang	Pratama
Kota Serang	Pratama
Kab Pandeglang	Pratama
Kab Lebak	Pratama
Kota Cilegon	Madya
Kota Tangerang	Madya
Kab Tangerang	Madya
Kota Tangerang Selatan	Nindya

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.3 Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya termasuk di kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi

Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain- lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai- sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (*over exploitation*); dan bencana alam.

Pencemaran udara di Provinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

Jenis industri/aktivitas yang ada di Provinsi Banten sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Provinsi Banten didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus diperhatikan dan diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3).

Limbah cair industri kecil selama ini belum dilakukan pengelolaan secara benar, terkadang limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Kendala utama adalah masalah biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah yang tinggi dan industri kecil tersebut tidak mampu

membuatnya. Selain itu juga masalah teknologi pengolahan limbah yang belum diketahui oleh sebagian besar industri kecil. Walaupun sebagian besar industri kecil tersebut menghasilkan limbah cair tidak berbahaya dan dalam jumlah yang sedikit, namun beberapa industri kecil di Provinsi Banten memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

2.3.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Provinsi Banten sampai saat ini masih terjadi ketimpangan. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Banten, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Banten yang seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan.

Tabel 2.69
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di
Provinsi Banten Tahun 2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan Pembinaan Pemerintah (Desa/Kel) (pemerintah desa dan BPD)	6	6	6	6	5
2	Cakupan Pengembangan Pemerintahan (Desa)	1261	1261	1262	1238	933
3	Rasio Desa/Kel yang Mengalami Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)	47,72	60,00	70,00	80,00	90,00
4	Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa BUMDes) (%)	79,34	79,34	85,00	80,00	72,12
5	Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	2,24	3,80	3,80	5,00	0,25
6	Jumlah masyarakat miskin yang meperoleh pemberdayaan sosial(KK)	2.012	1605	1.215	1.330	3.174

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
7	Jumlah Komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (KK)	220	200	220	250	320
8	Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	1 Posyantek	1 Posyantek	3 Posyantek	Gelar TTG Nasional Provinsi Aceh	10 Posyantek

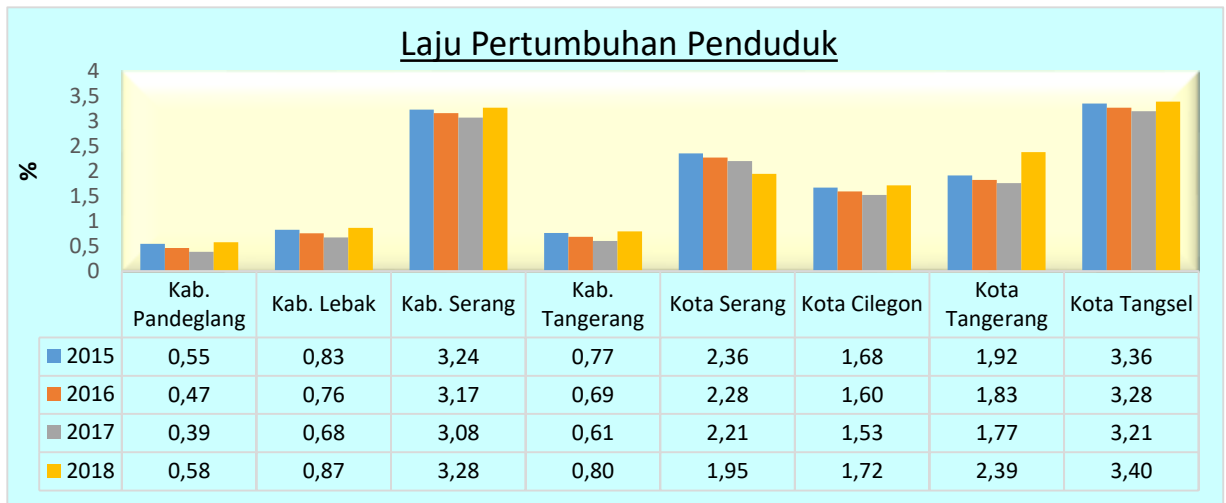
Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Penduduk Banten berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 12,45 juta jiwa yang terdiri atas 6,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6,1 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,94

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 1.288 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 13.902 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 376 jiwa/Km².



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.31
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Tabel 2.70
Jumlah Rumah tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah tangga
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Banyak Anggota Rumah Tangga
1	Kab Pandeglang	281.359	4,25
2	Kab Lebak	309.719	4,10
3	Kab Tangerang	827.015	4,08
4	Kab Serang	337.615	4,37
1	Kota Tangerang	540.97	3,78
2	Kota Cilegon	98.979	4,16
3	Kota Serang	141.176	4,46
4	Kota Tangerang Selatan	393.391	3,92
	Provinsi Banten	2.930.224	4,08

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.71
Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	KKB	PPKBD
1	Kab Pandeglang	37	340
2	Kab Lebak	48	347
3	Kab Tangerang	93	274
4	Kab Serang	47	327
1	Kota Tangerang	91	104
2	Kota Cilegon	25	43
3	Kota Serang	33	67
4	Kota Tangerang Selatan	150	54
	PROVINSI BANTEN	524	1556

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.72
Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif			
			IUD	MOW	MOP	Kondom
	KABUPATEN/KOTA					
1	Pandeglang	249.207	9.104	2000	2429	3964
2	Lebak	287.282	10.077	2384	2343	3078
3	Tangerang	711.203	53.504	13689	5289	12366
4	Serang	319.350	21.843	3855	2624	4101
	KOTA					
1	Tangerang	252.455	20.133	4967	811	7584
2	Cilegon	75.472	4774	1308	149	1416
3	Serang	116.958	8119	1759	415	2994
4	Tangerang Selatan	644.255	35.681	6630	1758	37931
	PROVINSI BANTEN	2.656.182	163.235	36592	15818	73434

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.73
Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang
Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan KB Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyuluhan Kespro	Penyuluhan HIV/AIDS	Penyuluhan KB
	Kabupaten			
1	Pandeglang	-	775	-
2	Lebak	-	418	-
3	Tangerang	-	-	-
4	Serang	-	450	-
	Kota			
1	Tangerang	-	1.53	-
2	Cilegon	--	1.852	-
3	Serang	-	440	-
4	Tangerang Selatan	-	100	-
	Provinsi Banten	-	1.53	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.6 Perhubungan

Pada tahun 2017, dari 762,03 km jalan di Provinsi Banten, sepanjang 432,13 km dalam kondisi baik (56,71%), kemudian 170,69 km dalam kondisi sedang (22,40%), 75,58 km dalam kondisi rusak (9,92%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (10,97%). Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 660,41 ribu mobil penumpang, 1,95 ribu bus, 158,55 ribu truk, dan 4,12 juta sepeda motor.

Tabel 2.74
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis kendaraan			
		Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
Kabupaten					
1	Pandeglang	14.386	402	7.732	215.708
2	Lebak	12.989	34	8.267	253.224
3	Tangerang	150.003	210	46.980	1.224.583
4	Serang	26.439	88	10.759	368.806
Kota					
1	Tangerang	186.046	691	40.195	954.431
2	Cilegon	30.746	114	9.699	242.801
3	Serang	34.736	439	8.178	208.750
4	Tangerang Selatan	205.061	125	26.744	648.493
	Total	660.406	1.953	158.554	4.116.796

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.75
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang
berwenang mengelolanya di Provinsi Banten (km)

No	Kabupaten/Kota	Pemerintahan yang Berwenang mengelola			
		Negara	provinsi	Kab/Kota	Jumlah
	Kabupaten				
1	Pandeglang	186,97	132,48	723,03	1.042,48
2	Lebak	146,59	184,39	837,96	1.168,94
3	Tangerang	27,73	111,95	992,61	1.132,29
4	Serang	113,80	128,06	601,13	842,99
	Kota				
5	Tangerang	18,40	31,81	280,71	330,92
6	Cilegon	47,07	3,36	304,13	354,56
7	Serang	14,51	118,36	164,90	297,77
8	Tangerang Selatan	9,80	51,61	397,65	459,07
	Jumlah	546,89	762,03	4.302,12	6.955,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.76
Kondisi Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang
berwenang mengelolanya di Provinsi Banten Tahun 2017 (km)

No	Kabupaten/Kota	Pemerintahan yang Berwenang mengelola			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
	Kabupaten				
1	Pandeglang	74,04	82,63	19,20	11,10
2	Lebak	66,52	34,21	17,90	11,11
3	Tangerang	7,70	18,00	2,00	-
4	Serang	72,00	37,36	3,65	0,8
	Kota				
5	Tangerang	5,90	11,53	0,97	-
6	Cilegon	24,50	21,25	1,32	-
7	Serang	10,86	3,10	0,10	-
8	Tangerang Selatan	5,41	3,90	0,50	-
	Jumlah	266,93	211,98	45,64	23,01

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Penumpang domestik yang menggunakan transportasi udara pada tahun 2017 adalah sebanyak 23.719.345 orang datang dan 21.923.671 orang pergi dari bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, tercatat juga sebanyak 2.701.030 orang transit di bandara ini. Sedangkan untuk penumpang internasional tercatat 7.234.235 orang datang, 7.420.353 orang berangkat dan 31.009 orang transit di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2017.

2.3.2.7 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di wilayah provinsi Banten terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektronik telah banyak dinikmati oleh masyarakat Banten. Secara umum jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 5,40 persen di tahun 2015, menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 masih tercatat sebanyak 7,85 persen. Penurunan penggunaan telepon rumah terjadi baik pada rumah tangga yang tinggal di perkotaan, maupun yang tinggal di daerah perdesaan. Pengguna telepon rumah masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 7,75 persen sedangkan di perdesaan hanya 0,3 persen.

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Pada tahun 2015, penggunaan telepon seluler meningkat 2,51 persen dibandingkan tahun 2013, dari 89,53 persen menjadi 92,04 persen. Di perdesaan peningkatan penggunaan telepon seluler lebih besar dibandingkan di perkotaan, dimana di perdesaan jumlah pengguna telepon seluler naik 5,97 persen dari 77,67 persen di tahun 2013 menjadi 83,64 persen di tahun 2015. Sedangkan di perkotaan pengguna telepon seluler hanya meningkat 0,89 persen dari 95,03 persen di tahun 2013 menjadi 95,92 persen di tahun 2015.

2.3.2.8 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Banten ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan

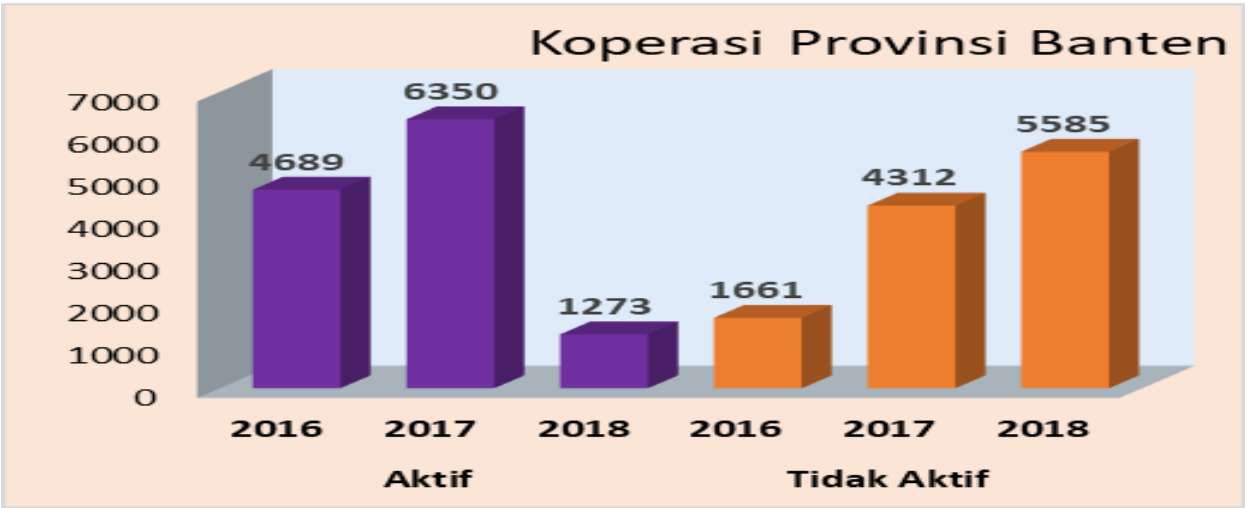
ekonorni dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonorni daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonorni daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Tabel 2.77
Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Kab/Kota	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Kab. Pandeglang	434	109	543	440	110	550	465	100	565
2	Kab. Lebak	696	98	794	757	82	839	521	322	843
3	Kab. Tangerang	684	202	886	934	254	1.188	1.126	433	1.559
4	Kab. Serang	623	460	1.083	457	203	660	511	814	1.325
5	Kota Cilegon	604	404	1.008	662	116	778	301	230	531
6	Kota Serang	299	189	488	403	138	541	166	202	368
7	Kota Tangerang	674	168	842	277	47	324	421	480	901
8	Kota Tangsel	502	20	522	234	297	531	328	298	626

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.32
Koperasi Provinsi Banten Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 2.78
 Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
 Tahun 2016 s.d 2017

NO	KABUPATEN /KOTA	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	KOTA TANGERANG	8.043	1.478	427	9.948	103.750	20.717	7.380	131.847
2	KOTA TANGERANG SELATAN	4.719	1.214	308	6.241	86.611	13.660	5.503	105.774
3	KOTA CILEGON	4.048	55	4	4.107	37.912	4.374	1.614	43.900
4	KOTA SERANG	2.079	31	3	2.113	56.969	6.842	1.494	65.305
5	KABUPATEN SERANG	37.242	12.608	280	50.130	103.750	10.459	1.265	115.474
6	KABUPATEN TANGERANG	1.728	135	15	1.878	212.626	26.019	7.464	246.109
7	KABUPATEN LEBAK	53.529	650	8	54.187	110.386	7.295	589	118.270
8	KABUPATEN PANDEGLANG	495	24	0	515	108.504	8.504	790	117.798
TOTAL		111,388	16.171	1.045	128.604	820.508	97.870	26.099	944.477

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.9 Penanaman Modal

Iklim investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Banten yang strategis menempatkan Banten menjadi tujuan investasi, baik PenanamanModal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Banten.

Tabel 2.79
 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu USD)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	7	12,90	--
Kab. Lebak	29	3.943,60	--
Kab. Tangerang	1.048	785.355,30	--
Kab. Serang	358	505.235,30	--
Kota Tangerang	543	212.247,20	--
Kota Cilegan	227	903.192,20	--
Kota Serang	18	484.720,40	--
Kota Tangerang Selatan	249	152.762,60	--
Total	2.479	3.047.469,50	--

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Realisasi investasi di Provinsi Banten tidak hanya berhasil melampaui target daerah, namun juga berhasil menembus target nasional. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Banten, total realisasi investasi Provinsi Banten tahun 2016 mencapai Rp. 52,3 triliun dengan 2.980 proyek dari target nasional sebesar Rp. 50 triliun dan target daerah sebesar Rp. 14,1 triliun. Dengan demikian, tingkat capaian realisasi investasi di Banten tahun 2016 sebesar 104,60 persen dari target nasional dan 370,92 persen dari target daerah.

Peningkatan realisasi investasi juga diikuti dengan tingginya minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Banten. Berdasarkan LKPM tersebut, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Banten tahun 2016 menempati urutan ke-3 setelah DKI Jakarta dengan nilai investasi mencapai 2.912,1 juta US\$ dari 2161 proyek.

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten berada di peringkat ke-4 dengan nilai investasi mencapai Rp 12,42 triliun dengan 496 proyek.

Tabel 2.80
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (juta RP)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	7	444.705,50	--
Kab. Lebak	14	5.359,00	--
Kab. Tangerang	298	5.340.184,80	--
Kab. Serang	112	3.451.313,00	--
Kota Tangerang	169	1.881.900,40	--
Kota Cilegon	57	3.315.784,60	--
Kota Serang	11	241.982,60	--
Kota Tangerang Selatan	31	460.675,20	--
Total	699	15.141.904,70	--

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.81
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribuan Juta)
1	Pertanian/Perikanan		
	Perikanan	-	-
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	263.809,90
2	Peternakan	8	73.037,10
3	Pertambangan dan penggalian	7	15.288,40
4	Industri Pengolahan		
	1). Makanan	85	3.431.603,10
	2). Tekstil	25	146.460.00

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu Juta)
	3). Kulit, Barang dari Kulit Sepatu	7	2900,00
	4). Kayu	8	4.740,00
	5). Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	22	226.563,60
	6). Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	96	1.080.861,90
	7). Alat Angkutan dan Tranportasi Lainnya	10	79.610,10
	8). Karet, Barang dari Karet dan Plastik	84	715.414,30
	9). Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, dan Elektronik	131	2.653.612,50
	10). Mineral non Logam	28	1.351.596,30
	11). Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	0,00
	12). Lainnya	16	44.545,30
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	15	1.582.446,30
6	Konstruksi	8	85.329,30
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
	Perdagangan dan Reparasi	47	185.713,40
	Hotel dan Restoran	23	133.244,60
8	Pengangkutan dan Komunikasi	12	2.290.020,70
9	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	49	736.962,80
10	Jasa Lainnya	14	38.145,10
	Total	699	15.141.904,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Dari sebaran investasi pada Januari-Desember Tahun 2015, seperti tahun sebelumnya, nilai investasi tertinggi PMA berada di Kota Cilegon dengan nilai investasi sebesar 1,48 miliar US\$ dengan 193 proyek, disusul berturut-turut Kabupaten Tangerang sebesar 421 juta US\$ dengan 815 proyek, Kabupaten Serang sebesar 338 juta US\$ dengan 330 proyek, Kota Serang sebesar 302 juta US\$ dengan 38 proyek, Kota Tangerang 223,8 juta US\$ dengan 560 proyek, Kota Tangerang Selatan sebesar 115 juta US\$ dengan 194 proyek, Kabupaten Lebak sebesar 26 juta US\$ dengan 27 proyek, dan Kabupaten Pandeglang sebesar 1,4 juta US\$ dengan 4 proyek.

Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kabupaten Tangerang menempati urutan pertama dengan nilai investasi Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 6,1 triliun dengan 212 proyek, disusul berturut-turut yakni Kota Tangerang sebesar Rp. 2,4 triliun dengan 111 proyek, Kota Cilegon sebesar Rp. 2,3 triliun dengan 49 proyek, Kabupaten Serang sebesar Rp. 715 miliar dengan 73 proyek, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 657 miliar dengan 23 proyek, Kota Serang sebesar Rp. 35,4 miliar dengan 11 proyek, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 16,5 miliar dengan 7 proyek, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2,1 miliar dengan 10 proyek.

Tabel 2.82
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor
 Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu Juta)
1	Pertanian/Perikanan		
	Perikanan	-	-
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	263.809,90
2	Peternakan	8	73.037,10
3	Pertambangan dan penggalian	7	15.288,40
4	Industri Pengolahan		
	1). Makanan	85	3.431.603,10
	2). Tekstil	25	146.460,00
	3). Kulit, Barang dari Kulit Sepatu	7	2900,00
	4). Kayu	8	4.740,00
	5). Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	22	226.563,60
	6). Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	96	1.080.861,90
	7). Alat Angkutan dan Tranportasi Lainnya	10	79.610,10
	8). Karet, Barang dari Karet dan Plastik	84	715.414,30
	9). Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, dan	131	2.653.612,50
	10). Mineral non Logam	28	1.351.596,30
	11). Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	0,00
	12). Lainnya	16	44.545,30
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	15	1.582.446,30
6	Konstruksi	8	85.329,30
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
	Perdagangan dan Reparasi	47	185.713,40
	Hotel dan Restoran	23	133.244,60
8	Pengangkutan dan Komunikasi	12	2.290.020,70
9	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	49	736.962,80
10	Jasa Lainnya	14	38.145,10
	Total	699	15.141.904,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.10 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang sangat strategis. Berdasarkan data SUPAS 2015, sebagian besar penduduk Provinsi Banten berada pada kelompok umur muda, dengan dependency ratio sebesar 46,94. Angka ini menunjukkan bahwa 100 orang produktif di Provinsi Banten akan menanggung 47 orang non produktif. Angka Ketergantungan yang berada di bawah 50 menunjukkan bahwa di Provinsi Banten terdapat penduduk usia produktif yang cukup banyak, atau mengalami bonus demografi. Bonus Demografi, yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan akan memunculkan kesempatan (window of opportunity) bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bonus demografi dapat dimanfaatkan apabila wilayah tersebut sudah dapat mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Apabila sumber daya

manusia tidak dipersiapkan dengan baik maka bonus demografi akan menjadi bencana demografi, karena jumlah penduduk usia muda yang cukup banyak akan berdampak pada berbagai masalah kerawanan sosial. Untuk memanfaatkan peluang bonus demografi dan menghindari bencana demografi, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia.

Sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, pemuda perlu dikembangkan agar berkualitas unggul dan memiliki daya saing tinggi, melalui pembangunan di bidang kepemudaan yang tercermin pada Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda memotret situasi pembangunan pemuda berdasarkan disagregasi data yang terdiri dari lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2016, kinerja pembangunan kepemudaan Banten menunjukkan angka 49,17 atau peringkat ke-22 secara nasional. Capaian ini mengalami peningkatan dari IPP pada Tahun 2015 yang sebesar 45,83 atau peringkat ke-24 secara nasional.

Pada domain pendidikan, rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah menengah cenderung baik—begitu pula partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nilai sub-indeks indikator-indikator ini berada pada kisaran 7-9 poin.

Capaian terendah Provinsi Banten adalah pada partisipasi pemuda dalam organisasi, kurang dari empat persen. Hal ini membuat nilai sub-indeksnya berada di nilai terendah, satu poin. Tiga indikator berikutnya mencatat nilai sub-indeks dua poin, masing-masing adalah pemuda wirausaha, pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, serta pemuda perempuan 16-24 tahun bersekolah menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2016 pemuda wirausaha tidak cukup banyak, kurang dari 0,3 persen. Angka ini turun dari angka pada IPP tahun 2015 sebesar 0,4 persen. Sementara itu, perempuan 16-24 bersekolah menengah dan perguruan tinggi hanya naik kurang dari tiga persen dari capaian 33 persen di tahun 2015 lalu, sehingga membuat sub-indeksnya tidak mengalami perubahan.

Selain melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan. Secara kontekstual, pembangunan keolahragaan telah menjadi bagian dari upaya pembangunan

secara keseluruhan. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menggariskan bahwa keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Lebih daripada itu, keolahragaan nasional ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa, pembangunan olahraga juga dalam rangka mempersatukan negara-bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia, seperti nampak dalam semboyan sport for peace atau olahraga untuk perdamaian. Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas.

Gambaran pembangunan olah raga di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Prestasi Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2012-2016

Tahun	Tingkat Internasional				Tingkat Nasional				
	Medali			Cabang Olahraga	medali			Cabang Olahraga	
	1	2	3		1	2	3		
2012	-	2	1	Judo	9	6	13	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	
2013	3	-	2	Judo, Karate	8	6	14	Judo, Renang, Senam, Gulat, Atletik, Tae Kwon Do, Tinju, Karate	
2014	3	-	-	Karate	9	7	15	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	
2015	14	1	2	Judo, Karate, Gulat & Tae Kwon Do	5	9	17	Angkat Besi, Bulutangkis, Gulat, Judo, Tenis Meja, Renang, Atletik, Pencaksilat, Karate, Tae Kwon Do	
2016	10	1	1	Judo, Karate	15	11	8	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	

Keterangan: (Medali 1: emas, 2: Perak, 3: Perunggu)

Selain dengan perolehan medali, terdapat indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga, yaitu Sport Development Index (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga. Melalui pendekatan komprehensif ini, pembangunan olahraga dipandang sebagai suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk

melakukan aktivitas fisik. Oleh karenanya, pembangunan olahraga harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna.

SDI merupakan suatu indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

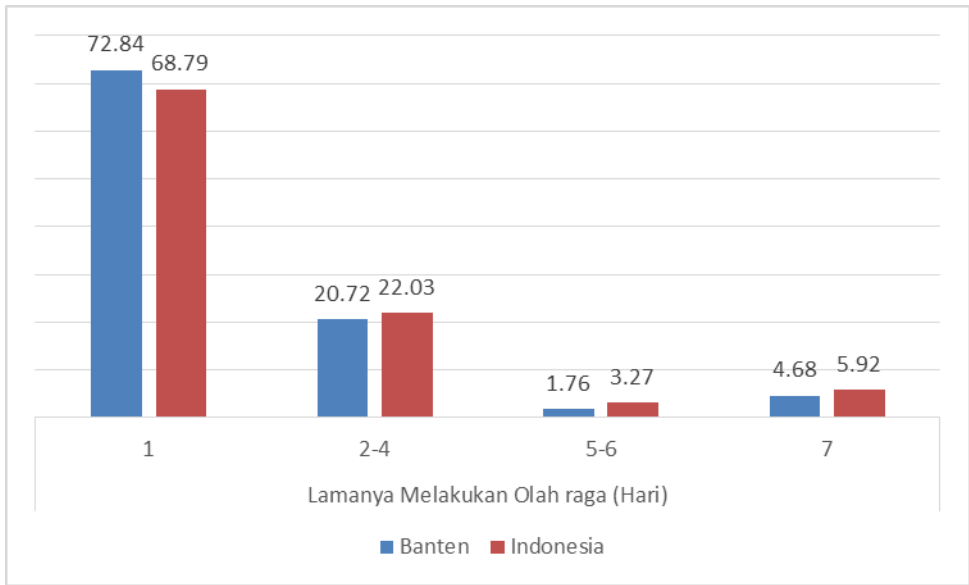
Gambaran kondisi sumber daya manusia keolahragaan di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pelatih	718	718	718	718	718
Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat	40	40	40	80	115
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	5,57	5,57	5,57	11,14	16,02

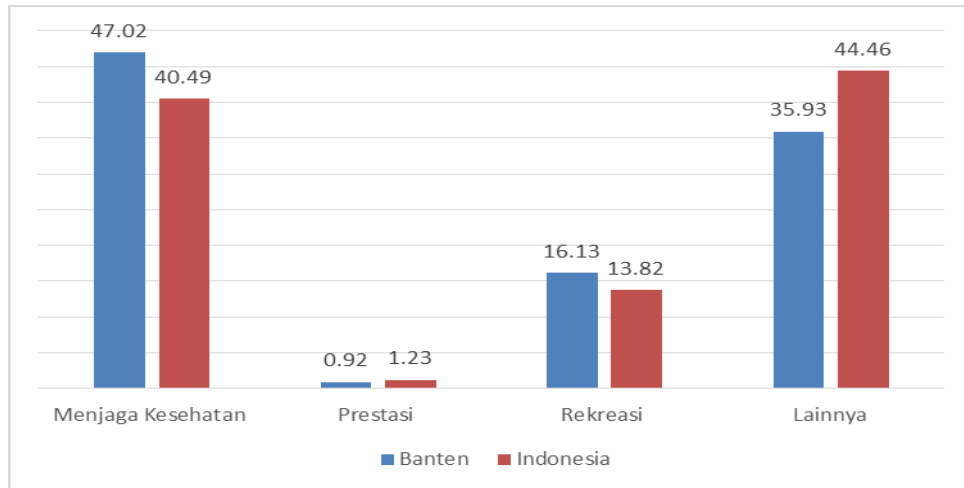
Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dilihat dari sisi sumber daya manusia keolahragaan, jumlah pelatih yang bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dilihat dari sisi partisipasi olahraga, Provinsi Banten masih lebih rendah secara rata-rata nasional.



Sumber: Statistik Sosial Budaya, 2015

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir dan Lamanya Melakukan Olahraga (Hari) di Banten dan Indonesia, 2015



Sumber: Statistik Sosial Budaya, 2015

Gambar 2.34
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga dan Tujuan Olah Raga selama Seminggu Terakhir di Banten dan Indonesia, 2015

Rendahnya partisipasi olahraga dan tujuan melakukan olahraga prestasi mengindikasikan bahwa atlet, klub, penggemar olahraga dan masyarakat Provinsi Banten memerlukan fasilitas yang representatif dan terpadu, yang mampu mewadahi aktivitas seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan, maupun untuk rekreasi.

Lebih daripada itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memungkinkan Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

2.3.2.11 Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah Provinsi meliputi Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, serta Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Berkaitan dengan Kesenian Tradisional, kewenangan daerah Provinsi adalah Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota. Pada Sub Urusan Sejarah, Daerah Provinsi menangani

Pembinaan sejarah lokal provinsi. Untuk Sub Urusan Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi menangani Penetapan cagar budaya peringkat provinsi, Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi, sedangkan untuk Permuseuman, Pemerintah Provinsi menangani Pengelolaan museum provinsi.

Pembangunan kebudayaan di Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasny arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Banten seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Tabel 2.85
Jumlah Seni dan Budaya Provinsi Banten Tahun 2016

SENI DAN BUDAYA PROVINSI BANTEN	TOTAL
CAGAR BUDAYA	26
MUSEUM	5
MAESTRO	2
WARISAN BUDAYA TAK BENDA	58
KOMUNITAS ADAT	36
TRADISI	28
BAHASA DAERAH	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.86
Jumlah Museum, Situs Purbakala, dan Bangunan Bersejarah Lainnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Museum	Situs Purbakala	Bangunan Bersejarah	Makam Sejarah
1	Kab. Pandeglang	1	9	17	98
2	Kab. Lebak	1	4	10	17
3	Kab. Tangerang	-	6	6	43
4	Kab. Serang	-	4	2	6
5	Kota Tangerang	-	2	9	2
6	Kota Cilegan	4	3	3	2
7	Kota Serang	3	48	39	66
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	3	12
	Provinsi Banten	9	77	89	246

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.87
 Jumlah Sanggar Seni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
 Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Sanggar Seni	Seni Tradisional	Seni Tradisi	Seni Modern
1	Kab. Pandeglang	191	4	14	18
2	Kab. Lebak	9	3	5	1
3	Kab. Tangerang	264	8	33	72
4	Kab. Serang	34	7	13	3
5	Kota Tangerang	623	6	5	228
6	Kota Cilegan	77	5	27	4
7	Kota Serang	54	19	19	11
8	Kota Tangerang Selatan	48	3	-	6
	Provinsi Banten	1.300	55	116	34

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.88
 Jumlah Lembaga dan Tenaga Seni Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Seniman	Lembaga Seni	Galeri
1	Kab. Pandeglang	94		1
2	Kab. Lebak	10	2	1
3	Kab. Tangerang	33	1	-
4	Kab. Serang	13	2	1
5	Kota Tangerang	5	1	1
6	Kota Cilegon	21	-	2
7	Kota Serang	38	7	54
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	1
	Banten	214	14	61

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.12 Perpustakaan

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertambahannya sangat kecil dari 47.218 pengunjung pada tahun 2012 hanya bertambah menjadi 131.804 pengunjung pada tahun 2016 dengan rata-rata penambahan sebesar 32,59 persen.

Tabel 2.89
 Data dan Informasi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten
 Tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)	47.218	52.108	52.525	73.598	131.804
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Eksemplar)	6.200	8.950	29.570	39.965	68.200
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
4	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan perhari (Orang)	196	217	218	255	361
5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	2.200	950	7.020	3.465	5540
6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	27	30	30	38	42

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	a. Pustakawan	1	4	4	5	5
	b. Tenaga Teknis					
	- PNS	8	8	8	17	18
	- Non PNS	18	18	18	15	17
	c. Penilai				1	2

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.13 Kearsipan

Pengelolaan arsip menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan hanya 40 persen pada tahun 2012 dan meningkat 30 persen pada tahun 2016 sebesar 70 persen.

Tabel 2.90
Data dan Informasi Kearsipan Daerah Provinsi Banten 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%)	40%	51%	63%	70%	70%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	116	123	137	139	171
3	Jumlah Koleksi Hasanah Arsip Statis di Depo Arsip Banten (Boks Arsip)	200	300	400	1.000	2.500
4	Jumlah Pengunjung Depo Arsip Banten (Orang)	120	240	360	480	600

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.14 Statistik

Akurasi data dan informasi dalam perencanaan pembangunan merupakan kunci keberhasilan bagi sebuah data dan informasi yang berkualitas. Data yang valid menjadi penting karena pihak-pihak terkait yang akan membutuhkan tidak akan banyak bertanya terkait validitas data dan sumber data yang hasilnya kadang tiap instansi berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut peningkatan akurasi akan data menjadi salah satu sasaran indikator kinerja bagi dinas atau OPD pengampunya. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi. pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan.

2.3.2.15 Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah dokumen pemerintah dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian tersebut di Provinsi Banten diserahkan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Provinsi Banten sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumberdaya manusia ASN di Banten belum ada yang secara khusus menangani hal ini. Selain itu belum terjalannya forum komunikasi sandi se Banten yang nanti didalamnya banyak pihak-pihak terkait terlibat seperti Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Banten, TNI, POLDA, Kejaksaan Tinggi. Harapannya jika sudah ada forum komunikasi terkait problem keamanan persandian pada pemerintah bisa elaborasi langkah apa dan program apa yang akan dijalankan terkait kegiatan persandian di Provinsi Banten.

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan, Provinsi Banten tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan 61 buah pulau-pulau kecil yaitu di Kota Cilegon sebanyak 5 pulau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 33 pulau, Kabupaten Serang sebanyak 17 pulau, Kabupaten Tangerang sebanyak 1 pulau, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 pulau. Di samping itu Banten memiliki garis pantai 499,62 km, terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga (the sunken treasures).

Di perairan Laut Banten, peluang pengembangan sangat besar karena kaya akan jenis-jenis ikan dengan potensi sebesar 60.400 ton/tahun (Proyeksi Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Laut 2010-2014 menurut Provinsi dalam Renstra KKP, 2010), sedangkan potensi perairan umum mencapai 2.965 ton/tahun (Laporan Statistik Perikanan Tangkap, 2010). Di Laut Selatan (Samudera Hindia), peluang pengembangan terbuka lebar dengan potensi sebesar 666.240 ton/thn.

Di bidang Perikanan Budidaya, peluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 27.562 ha.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cekdam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Barat dan Pantai Selatan Banten, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 66,80%.

Untuk kondisi perikanan tangkap sepanjang Pantai Utara merupakan

konsentrasi dan pemukiman nelayan, bila dibandingkan Pantai Barat dan Pantai Selatan. Tercatat jumlah nelayan di Banten pada tahun 2015 mencapai 30.791 orang yang mendiami 61 desa di Pesisir Utara, 48 desa di pesisir Barat dan 20 desa di Pesisir Selatan.

Jumlah armada perikanan tangkap tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7.185 buah, didominasi oleh jenis armada kapal motor yang jumlahnya mencapai 6.200 unit.

Pada tahun 2017, di Provinsi Banten terdapat 9.235 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2017 sebesar 107,36 ribu ton, dimana 106,54 ribu ton atau 99,24 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Produksi Perikanan di Provinsi Banten (Ton) Tahun 2010-2014

NO	KAB./KOTA	JUMLAH		
		2012	2013	2014
1	Kab Pandeglang	7.216	9.188	9.583
2	Kab Lebak	3.527	3.535	3.545
3	Kab Tangerang	19.869	20.906	21.244
4	Kab Serang	53.724	62.537	68.355
5	Kota Tangerang	443	462	473
6	Kota Cilegon	250	273	263
7	Kota Serang	1.258	1.918	1.817
8	Kota Tangerang Selatan	847	539	357
	Provinsi Banten	87.134	99.358	105.635

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.92
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Banten (ton) Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kab Pandeglang	18.566,20	13.782,38	-	31,34	18.566,20	13.813,73
2	Kab Lebak	5.812,40	2323,02	376,00	37,58	6.188,4	2.360,60
3	Kab Tangerang	16.372,10	86944,28	71,00	81,49	16.443,10	87.025,76
4	Kab Serang	8.128,38	644,40	112,00	646,97	8.240,34	1.291,37
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	357,60	726,95	-	357,60	357,60	749,25
7	Kota Seraang	3.206,50	2123,69	-	3.206,50	3.206,50	2.123,69
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
	Provinsi Banten	59.103,00	68.004,50	559,00	819,67	53.002,14	107.364,3

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.93
Luas Areal Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Budidaya di Provinsi Banten (ha) Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
1	Kab Pandeglang	92	66	1.485	-	25	-	1.668
2	Kab Lebak	-	54	4.914	520	18	-	5.506
3	Kab Tangerang	250	965	3.408	-	134	-	4.757
4	Kab Serang	1.075	975	744	-	10	-	2.804
5	Kota Tangerang	-	-	522	-	-	-	522
6	Kota Cilegon	-	-	188	-	-	-	188
7	Kota Seraang	57	456	1.072	-	10	-	1.595
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	390	-	-	-	390
Banten		861,6	1.474	2.516	12.723	520	197	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

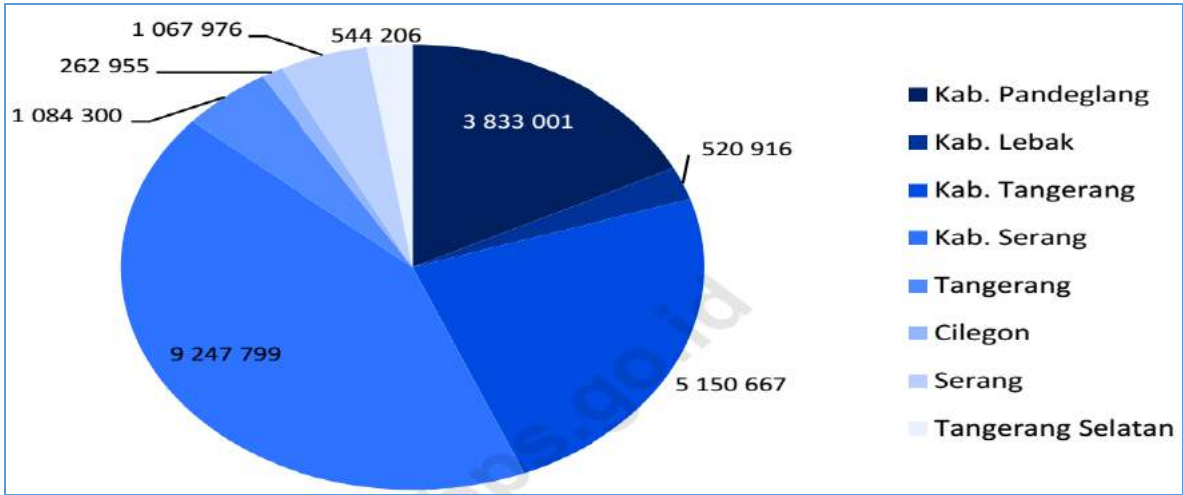
2.3.3.2 Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel nonbintang.

Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah dan 232 makam sejarah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.35
Jumlah Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten (orang) Tahun 2017

Tabel 2.94
Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2012-2014

Jenis Tamu	Banyaknya Tamu Hotel (Ribuan Jiwa)		
	2012	2013	2014
Tamu Asing	100,69	359,61	175,94
Tamu Indonesia	1.339,92	2.976,69	1.627,93
Tamu Asing dan Indonesia	1.440,61	3.336,30	1.803,87

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.95
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut
Bulan di Provinsi Banten (hari) Tahun 2017

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	1,68	1,46
Februari	2,25	1,48
Maret	1,75	1,45
April	2,01	1,43
Mei	2,06	1,47
Juni	1,96	1,42
Juli	2,09	1,52
Agustus	3,66	1,42
September	1,44	1,42
Oktober	1,88	1,49
November	1,66	1,40
Desember	1,58	1,21
Rata-rata	1,95	1,43

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.96
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang) Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1	Kab Pandeglang	3.831.027	1.974	3.833.001
2	Kab Lebak	519.241	1.675	520.916
3	Kab Tangerang	5.105.545	45.122	5.150.667
4	Kab Serang	9.245.374	2.425	9.247.799
5	Kota Tangerang	785.524	298.776	1.084.300
6	Kota Cilegon	212.801	50.154	262.955
7	Kota Seraang	1.066.885	1.091	1.067.976
8	Kota Tangerang Selatan	541.960	2.246	544.206
Banten		21.380.357	403.463	21.711.820

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.97
Jumlah Objek Wisata Tirta Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisata Tirta					Jumlah
		Situ/ Danau	Air panas	Air Terjun	Arung Jeram	Kolam Renang	
1	Kab Pandeglang	6	4	37	5	5	57
2	Kab Lebak	3	4	12	1	5	25
3	Kab Tangerang	8	-	-	-	9	17
4	Kab Serang	7	3	6	-	3	19
5	Kota Tangerang	4	-	-	-	12	16
6	Kota Cilegon	1	-	-	-	3	4
7	Kota Seraang	1	1	-	-	7	9
8	Kota Tangerang Selatan	9	-	-	-	15	24
Banten		39	12	55	6	59	171

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.98
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di
Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Marina Pantai	Wisata Sejarah	Suaka Alam	Objek Wisata Lainnya	Jumlah
1	Kab Pandeglang	19	20	2	47	88
2	Kab Lebak	11	16	1	18	46
3	Kab Tangerang	7	14	-	34	55
4	Kab Serang	36	3	2	37	78
5	Kota Tangerang	-	9	-	10	19
6	Kota Cilegon	10	3	4	-	17
7	Kota Seraang	3	60	1	16	80
8	Kota Tangerang Selatan	-	2	3	15	20
Banten		86	127	13	177	403

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.99
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*
1	Kab Pandeglang	99	102	102	116
2	Kab Lebak	50	52	52	21
3	Kab Tangerang	131	132	132	-
4	Kab Serang	86	86	86	-
5	Kota Tangerang	172	179	179	385
6	Kota Cilegon	86	87	87	121
7	Kota Seraang	155	155	155	107
8	Kota Tangerang Selatan	331	354	354	202
Banten		1.110	1.147	1.147	952

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.3.3 Pertanian

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi sebagai berikut :

Tabel 2.100
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten (Ton) Tahun 2014-2017

Jenis Tanaman Pangan	2014	2015	2016	2017	2018
Padi					
Padi Sawah	1.959.596	2.127.671,26	2.300.595	2.369.731,00	1.643.046
Padi Ladang	1.877.312	61.325,29	57.607	43.747,00	
Palawija					
Jagung	154.454	11.870,20	19.882	63.518,00	331.865,38
Kedelai	10.983	7.291,31	4.020	2.126,00	18.093,56
Kacang Tanah	9.031	11.003,34	8.419	5.726,67	4.174
Kacang Hijau	12.384	541,89	432	220,70	281,18
Ubi Kayu	960	74.162,60	90.629	75.486,00	82.641,95
Ubi Jalar	89.141	20.149,91	24.255	20.724,00	16.470,53

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Sentra produksinya terletak pada kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan tahun 2014. Penambahan luas tanam dan panen harus diusahakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan pompanisasi, secara merata disemua sentra produksi, selain itu juga peningkatan produktivitas, melalui penerapan sistem penanaman jarak legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus.

Tabel 2.101
Penggunaan Irigasi Tanaman Pangan Tahun 2017-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Kab. Pandeglang	22.746,00	32.022,00	54.768,00	22.746	32.022	54.768
Kab. Lebak	26.135,00	27.947,70	54.082,70	22.747	25.006	47.753
Kab. Tangerang	24.220,00	11.976,00	36.196,00	23.744	12.487	36.231
Kab. Serang	26.138,10	21.863,70	48.001,80	23.887	23.687	47.574
Kota Tangerang	377,70	131,60	509,30	316	147	463
Kota Cilegon	0,00	1.594,90	1.594,90	-	1.503	1.503
Kota Serang	4.820,00	3.119,00	7.939,00	4.787	3.152	7.939
Kota Tangerang Selatan	0,00	91,00	91,00	-	54	54
Provinsi Banten	104.436,80	98.745,90	203.182,70	98.228	98.058	196.285

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.102
Penggunaan Lahan Tanaman Pangan Tahun 2017-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak Di Usahakan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak Di Usahakan
Kab. Pandeglang	63.331,00	31.408,00	4.990,00	63.331	31.408	4.990
Kab. Lebak	12.873,30	28.859,00	2.621,00	19.062	28.131	2.772
Kab. Tangerang	10.153,00	33,00	1.232,00	9.241	0	1.202
Kab. Serang	29.986,20	7.816,20	548,10	19.266	7.296	631
Kota Tangerang	538,30	0,00	239,00	546	36	246
Kota Cilegon	2.103,00	1.256,00	1.146,00	2.715	1.871	1.133
Kota Serang	7.279,00	1.312,00	0,00	7.279	1.723	0
Kota Tangerang	768,00	279,00	112,00	478	375	23
JUMLAH	127.031,8	70.963,20	10.888,10	121.918	70.839	10.997

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.103
Produktifitas Tanaman pangan Tahun 2017 – 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017					
		Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas
1	Kab. Pandeglang	135.057	768.477	56,90	6.162	20.834	33,81
2	Kab. Lebak	102.918	586.925	57,03	6.245	21.111	33,80
3	Kab. Tangerang	71.874	410.535	57,12	-	-	-
4	Kab. Serang	88.555	505.745	57,11	340	1.147	33,74
5	Kota Tangerang	528	3.001	56,87	-	-	-
6	Kota Cilegon	2.286	13.000	56,86	277	277	33,81
7	Kota Serang	14.394	81.617	56,70	379	379	33,81
8	Kota Tangerang Selatan	76	432	56,94	-	-	-
	Provinsi Banten	415.687	2.369.731	57,01	43.747	43.747	33,81

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017					
		Jagung			Kedelai		
		Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas
1	Kab. Pandeglang	10.296	41.418,00	40,23	1.267	1.636,00	12,92
2	Kab. Lebak	4.496	17.678,00	39,32	206	264,00	12,82
3	Kab. Tangerang	50	184,00	37,19	-	-	-
4	Kab. Serang	933	3.341,00	35,81	113	149,00	13,19
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	19	70,00	37,01	-	-	-
7	Kota Serang	185	669,00	36,17	55	69,00	12,61
8	Kota Tangerang Selatan	40	157,00	39,36	5	7,00	13,76
	Provinsi Banten	16.018,00	63.518	39,65	1.646,00	2.126	12,92

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018					
		Padi			Jagung		
		Luas Panen	Produksi	Produk- tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk- tivitas
1	Kab. Pandeglang	93.386	449.695	4,82	45.335	222.374,20	49,05
2	Kab. Lebak	81.029	378.079	4,67	18.962	98.431,45	51,91
3	Kab. Tangerang	66.930	316.152	4,72	46	251,81	54,98
4	Kab. Serang	79.459	419.228	5,28	1.582	8.456,06	53,46
5	Kota Tangerang	756	3.867	5,12	0	0,00	0,00
6	Kota Cilegon	1.721	8.284	4,81	262	1.474,79	56,31
7	Kota Serang	11.555	67.726	5,86	134	712,91	53,24
8	Kota Tangerang Selatan	3	15	5,00	35	164,16	46,90
Provinsi Banten		334.839	1.643.046	4,91	66.356	331.865,38	50,01

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018		
		Kedelai		
		Luas Panen	Produksi	Produk- tivitas
1	Kab. Pandeglang	18.925	14.115,01	7,46
2	Kab. Lebak	4.001	3.374,63	8,43
3	Kab. Tangerang	0	0,00	0,00
4	Kab. Serang	665	600,91	9,04
5	Kota Tangerang	0	0,00	0,00
6	Kota Cilegon	1	0,55	5,54
7	Kota Serang	1	0,55	5,54
8	Kota Tangerang Selatan	2	1,90	9,50
Provinsi Banten		23 594	18.093,56	7,67

Sumber : SIPD Provinsi Banten

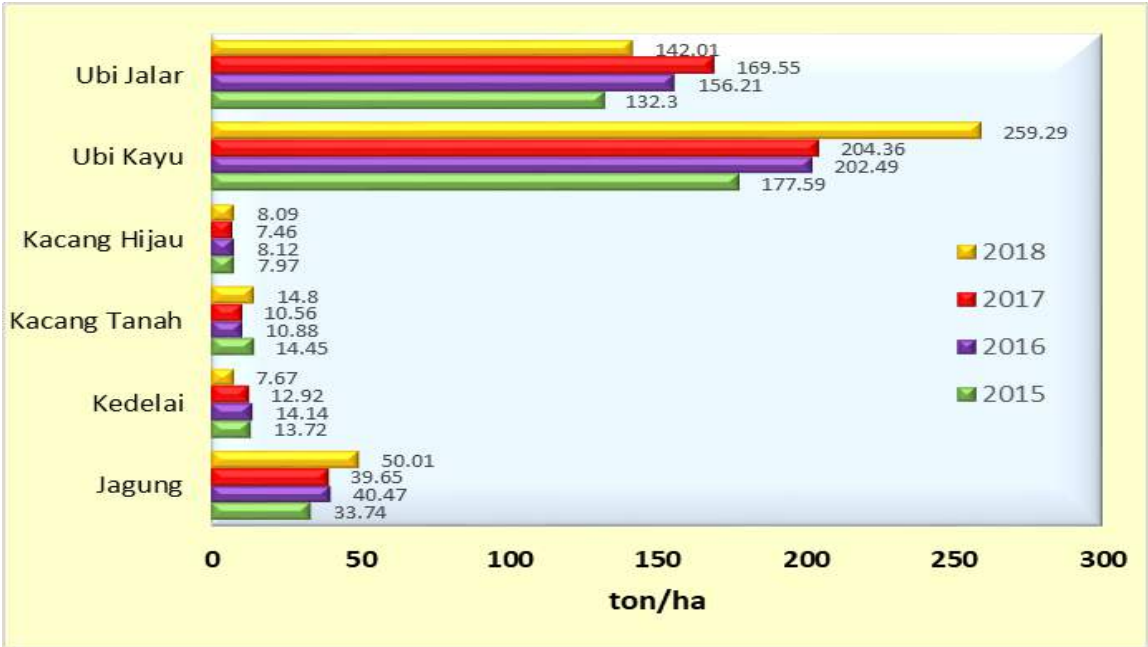
Peningkatan/penurunan produksi tanaman palawija pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penambahan/penurunan luas panen. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh tanaman ubi kayu dan tanaman kacang hijau, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 178 kw/ha dan 8 kw/ha.

Tabel 2.104
Statistik Tanaman Pangan Banten Tahun 2015-2018

JENIS TANAMAN	2015	2016	2017	2018
PADI				
- Luas Panen (000 Ha)	399.334	399.334	415.687	334.839
- Produksi (000 Ton)	2.300.595	2.300.595	2.369.731	1.643.046
- Produktivitas (Kw/Ha)	57,61	57,61	57,01	4,91
JAGUNG				
- Luas Panen (000 Ha)	3.518	4.913	16.018,00	66.356
- Produksi (000 Ton)	11.870,02	19.882	63.518,00	331.865,38
KEDELAI				
- Luas Panen (000 Ha)	5.316	2.844	1.646,00	23.594
- Produksi (000 Ton)	7.291,13	4.020	2.126,00	18.093,56

JENIS TANAMAN	2015	2016	2017	2018
KACANG TANAH				
- Luas Panen (000 Ha)	7.614	7.741	5.422,70	4.174
- Produksi (000 Ton)	11.003,34	8.419	5.726,67	6.178,18
KACANG HIJAU				
- Luas Panen (000 Ha)	680	532	295,80	347
- Produksi (000 Ton)	541.89	432	220,70	281,18
UBI KAYU				
- Luas Panen (000 Ha)	4.176	4.476	3.694,00	3.187
- Produksi (000 Ton)	74.162,60	90.629	75.486,00	82.641,95
UBI JALAR				
- Luas Panen (000 Ha)	1.523	1.553	1.222,00	1.160
- Produksi (000 Ton)	20.149,91	24.255	20.724,00	16.470,53

Sumber : SIPD Provinsi Banten



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.36
Produktivitas Tanaman Palawija Banten (Ribuan Ton)
Tahun 2015- 2018

Sedangkan Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Untuk Produksi sayur-sayuran menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar.

Tabel 2.105
 Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2017 (kuintal/Hektar)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017				
		Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Petai
1	Kab. Pandeglang	12	565	-	1	104
2	Kab. Lebak	2	378	-	-	9
3	Kab. Tangerang	14	49	-	-	364
4	Kab. Serang	245	433	-	-	347
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	320
6	Kota Cilegon	-	32	-	-	8
7	Kota Serang	1	48	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	70	-	-	65
Provinsi Banten		273	1.575	-	-	1.217

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018				
		Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Petai
1	Kab. Pandeglang	15	666	-	-	69
2	Kab. Lebak	1	329	-	-	24
3	Kab. Tangerang	13	56	-	-	393
4	Kab. Serang	106	4255	-	-	299
5	Kota Tangerang	-	3	-	-	294
6	Kota Cilegon	-	29	-	-	3
7	Kota Serang	2	77	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	53	-	-	35
Provinsi Banten		137	1.575	-	-	1.217

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (commodity flows) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Tabel 2.106
 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Tahun 2017			Tahun 2018	
	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)	Produktivitas (Kwinta/ha)	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)
Bawang Daun	64	299,90	46,86	86	459
Bawang Merah	273	994,10	36,41	137	880
Bawang Putih	-	-	-	0	-
Bayam	1.628	9.423,60	57,88	1 578	10.021
Blewah	2	-	2,00	0	-
Buncis	50	223,60	44,72	29	136
Cabai Besar	969	6.464,20	66,71	896	6.712
Cabai Rawit	606	4.571,80	75,44	572	5.225

Jenis Tanaman	Tahun 2017			Tahun 2018	
	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)	Produktivitas (Kwinta/ha)	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)
Jamur	17.436	13.925,00	7,99	13 226	16.456
Kacang Merah	3	3,20	10,67	0	-
Kacang Panjang	1.577	13.142,40	83,34	1 393	13.977
Kangkung	1.841	11.649,20	63,28	1 820	12.008
Kembang Kol	4	7,30	18.25	3	3
Ketimun	1.776	12.906,90	72,67	1 441	14.064
Kubis	1	1,40	14,00	0	-
Labu Siem	25	349,70	139,88	14	110
Lobak	1	0,50	5,00	0	-
Melon	26	106,50	40,96	28	82
Petsai/Sawi	1.217	8.132,80	66,83	1 117	8.535
Semangka	101	1.039,00	102,87	102	951
Terung	674	5.837,80	86,61	565	5.999
Tomat	214	1.016,80	47,51	163	783
Wortel	42	167,10	39,79	45	355

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.107
 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Buah buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Luas Panen (pohon)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/pohon)
Alpukat	8.775	13.488	153,71
Belimbing	12.560	11.576	92,17
Duku	10.081	5.045	50,04
Durian	289.038	226.280	78,29
Jambu Air	31.234	25.277	80,93
Jambu Biji	39.797	20.717	52,06
Jengkol	50.759	17.920	35,30
Jeruk Besar	762	805	105,64
Jeruk Siam	9.328	4.860	52,10
Mangga	251.148	183.630	73,12
Manggis	265.897	129.443	48,68
Markisa	271	153	56,46
Nangka	37.878	33.990	89,74
Nanas	25.717	2.184	8,49
Pepaya	112 179	79 478	70,85
Petai	65 093	34 945	53,68
Pisang	6 170 823	2 501 903	40,54
Rambutan	173 844	81 542	46,91
Salak	31 904	3 996	12,53
Sawo	12 987	13 547	104,31
Sirsak	50 645	16 248	32,08
Sukun	64 499	31 804	49,31
Melinjo	112 179	79 478	70,85

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Hubungan keterkaitan aliran komoditas pertanian unggulan antar daerah/wilayah di Provinsi Banten, terjadi baik antar daerah internal maupun dengan daerah luar (External region). Interaksi antar wilayah ini terjadi karena adanya saling melengkapi kebutuhan. Di satu daerah ada yang kelebihan produksi (surplus) suatu komoditas, sedangkan daerah lainnya kekurangan

(minus) produksi komoditas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi pola ruang aliran komoditas pertanian unggulan di Provinsi Banten.

Hal ini baik terasa maupun tidak terasa, cepat atau lambat akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan Provinsi Banten.

Tabel 2.108
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
Dlingi	5 500	4 100	0,75
Jahe	523 873	1 126 737	2,15
Kapulaga	19 405	43 006	2,22
Keji Beling	5 538	22 222	4,01
Kencur	341 299	493 814	1,45
Kunyit	427 503	813 093	1,90
Laos	1 045 636	3 641 410	3,48
Lempuyang	39 918	47 280	1,18
Lidah Buaya	6 017	7 653	1,27
Mahkota Dewa	3 705	129 857	35,05
Mengkudu	14 812	135 154	9,12
Sambiloto	6 361	10 105	1,59
Temuireng	295	585	1,98
Temukunci	6 498	7 634	1,17
Temulawak	21 275	25 787	1,21

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.109
Produktivitas Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Jahe	Laos	Kencur	Kunyit	Lempuyang	Temulawak
1	Kab. Pandeglang	1,69	0,96	0,96	1,32	1,28	1,33
2	Kab. Lebak	2,64	5,54	1,84	3,15	1,79	1,29
3	Kab. Tangerang	1,59	1,68	1,49	1,32	3,00	1,12
4	Kab. Serang	1,79	1,14	1,94	1,87	1,03	1,21
5	Kota Tangerang	3,40	3,58	3,09	2,85	-	3,00
6	Kota Cilegon	5,64	2,10	2,14	4,07	1,00	-
7	Kota Serang	3,26	1,32	2,12	1,35	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	1,31	1,62	1,32	1,31	1,66	1,66
	Provinsi Banten	2,15	3,48	1,45	1,90	1,18	1,21

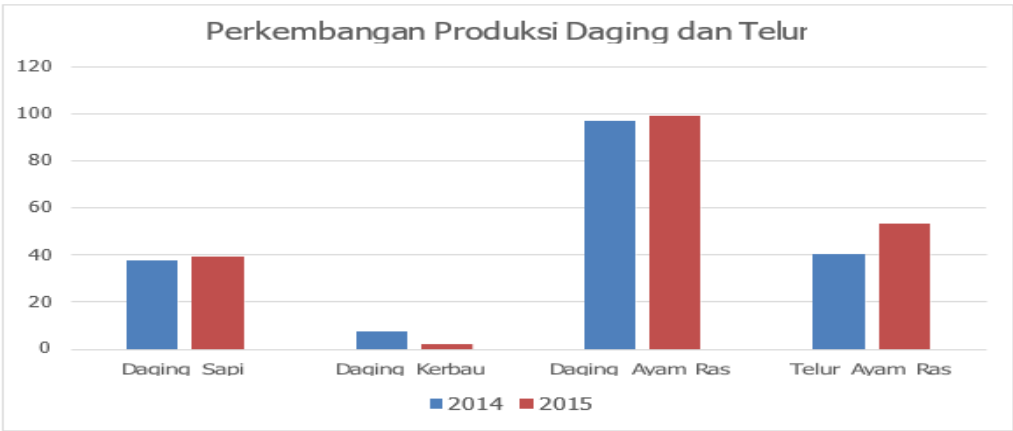
Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.110
Statistik Komoditas Tanaman Unggulan Provinsi Banten Tahun 2017

TANAMAN	SATUAN	2017
Anggrek	Juta Tangkai	40,22
Melinjo	Ton	62,16
Aren	Ton	3 287
Melon	Ton	40,96
Durian	Ton	78,29

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional. Banten menjadi produsen daging sapi terbesar keempat dan produsen daging kerbau nomor sepuluh di Indonesia. Tingkat produksi keduanya pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 39 ribu ton dan 2 ribu ton. Sementara sentra produksinya, untuk daging sapi terletak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Adapun daging kerbau di Kabupaten Serang dan Lebak. Selain daging sapi dan kerbau, Banten juga menjadi produsen daging ayam ras terbesar kelima dan produsen telur ayam ras terbanyak kesembilan di Indonesia. Tingkat produksi daging dan telur ayam ras ini masing-masing sebanyak 99 ribu ton dan 53 ribu ton, dengan sentra produksi terdapat di Kota Serang dan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.37
Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Provinsi Banten
Tahun 2014-2015 (ribu ton)

Tabel 2.111
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017					
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Kab. Pandeglang	202.334	246.841	-	249.336	179.269	
2	Kab. Lebak	644.271	684.008	-	320.276	228.981	
3	Kab. Tangerang	8.859.678	189.108	-	656.140	969.922	183.939
4	Kab. Serang	1.879.272	1.874.534	-	757.430	719.577	
5	Kota Tangerang	12.854.723	17.474	-	261.592	57.554	419.407
6	Kota Cilegon	487.580	31.952	-	68.634	39.983	
7	Kota Serang	2.210.923	314.081	-	80.901	156.401	
8	Kota Tangerang Selatan	3.138.325	82.517	122	940	531	34
	Provinsi Banten	30.277.105	3.440.515	122	2.395.249	2.352.218	603.380

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.112
 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018		
		Sapi	Kerbau	Kuda
1	Kab. Pandeglang	553 654	164 229	-
2	Kab. Lebak	1 155 003	1 261 855	-
3	Kab. Tangerang	10 415 435	191 324	-
4	Kab. Serang	239 458	2 263 818	-
5	Kota Tangerang	15 077 981	26 763	-
6	Kota Cilegon	1 303 251	34 505	-
7	Kota Serang	2 279 275	41 804	-
8	Kota Tangerang Selatan	4 676 067	110 713	-
	Provinsi Banten	35 700 124	4 095 011	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.113
 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Kab. Pandeglang	270.098	10.378	1.058.261	5.009
2	Kab. Lebak	2.088.460	68.680	8.256.104	74.014
3	Kab. Tangerang	1.501.968	2.942.775	28.929.924	166.128
4	Kab. Serang	883.394	1.134.658	12.022.747	704.265
5	Kota Tangerang	5.875.599	58.587	23.669.552	211.687
6	Kota Cilegon	52.421	-	10.299.898	2.719
7	Kota Serang	340.419	303.462	3.711.790	30.054
8	Kota Tangerang Selatan	50.174	83.000	109.092	2.950
	Provinsi Banten	11.062.533	4.601.540	88.057.369	1.196.826

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.114
 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Kab. Pandeglang	487.407	0	8.321.833	11.285
2	Kab. Lebak	1.742.338	56.569	7.622.181	73.298
3	Kab. Tangerang	876.806	2.588.332	34.261.894	108.791
4	Kab. Serang	60.516	31.482	20.177.083	60.050
5	Kota Tangerang	323.454	41.469	25.841.222	44.511
6	Kota Cilegon	26.780	-	305.671	3.613
7	Kota Serang	86.409	34.255	3.919.398	5.734
8	Kota Tangerang Selatan	72.443	71.001	24.080.545	145.122,73
	Provinsi Banten	3.676.152	2.823.108	124.529.829	452.404

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.115
 Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tahun 2017			
	Ayam Kampung	Ayam Telur	Itik	Itik Manila
Kab. Pandeglang	5.173,55	-	1.474,42	-
Kab. Lebak	1.266,61	1.244,19	429,48	160,18
Kab. Tangerang	4.528,54	36.867,75	3.085,04	446,43
Kab. Serang	4.005,47	5.600,55	3.229,43	-
Kota Tangerang	131,54	-	171,04	84,25
Kota Cilegon	74,39	6,80	71,23	-
Kota Serang	76,34	5.848,13	12,87	16,30
Kota Tangerang Selatan	61,35	1.427,18	23,19	-
Provinsi Banten	15.317,79	50.994,59	8.496,69	707,16

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.116
 Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Tahun 2018			
	Ayam Kampung	Ayam Telur	Itik	Itik Manila
Kab. Pandeglang	3.630,62	2.659,55	13,33	58,33
Kab. Lebak	1.230,55	1.257,14	369,72	167,27
Kab. Tangerang	4.646,28	37.520,11	3.165,25	458,04
Kab. Serang	3.960,85	36.865,00	2.504,87	-
Kota Tangerang	88,06	-	162,58	-
Kota Cilegon	95,84	6,34	72,84	-
Kota Serang	517,71	656,54	97,06	130,77
Kota Tangerang Selatan	84,04	1.007,98	24,95	-
Provinsi Banten	14.253,95	79.972,66	6.410,61	814,40

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.3.4 Kehutanan

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2017 berupa kayu bulat sebanyak 17,56 ribu m3 yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Produksi kayu jati pada tahun 2017 sebesar 11,69 ribu m3, dengan nilai produksi 27,89 miliar rupiah, sedangkan produksi kayu rimba sebesar 5,86 ribu m3 dengan nilai 1,95 miliar rupiah.

Tabel 2.117
 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
 Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam Dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi			Jumlah Luas Hutan Dan Perairan
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikon versi	
Pandeglang	429.846	107.290,36	7.059,00	2.645.604	-	14.510.386
Lebak	332.476	32.014,00	2.843.554	1.688.370	-	80.658
Kab. Tangerang	160.160	-	-	-	-	160.160
Kab. Serang	71.714	631.035	408.836	94.309	-	1.205.894
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Cilegon	45.482	-	-	24.428	-	69.910
Kota Serang	-	3.285	-	17.752	-	21.037
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
Total	1.039.678	14.564.756	3.958.290	4.470.463	-	24.033.187

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.118
Tabel 2.119. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di
Provinsi Banten Tahun 2012–2018 (m³)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu lapis
2012	34.777,28	--	-
2013	30.010,20	--	-
2014	29.812,93	-	-
2015	29.888,11	-	-
2016	5.324,12	-	-
2017	17.559,87	-	-
2018	21.542,57		

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.119
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Tahun 2012-2018

Tahun	Kayu jati		Kayu Rimba	
	Produksi (m3)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (m3)	Nilai Produksi (Rp)
2012	12.101,84	23.515,00	22.675,44	12.115,00
2013	14.311,89	23.338,00	15.698,31	6.407,00
2014	8.725,10	19.015,00	21.087,83	14.130,00
2015	14.640,29	47.917,00	15.247,82	15.864,00
2016	2.192,24	4.671,00	3.131,88	1.855,00
2017	11.694,52	27.886,79	5.865,35	1.951,57
2018	14.178,38	22.963,48	7.364,19	2.272,87

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2017, jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten sebanyak 203 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit, pasir laut, dan pasir darat. Dilihat dari luas wilayah penambangannya, bahan tambang jenis pasir laut memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 38,39 ribu ha. Sementara itu, dari jumlah produksinya, andesit memiliki produksi terbesar yaitu 2,66 juta m3.